



Strategi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Kepulauan Anambas

Lenny Romauli Marpaung, Hermanto Siregar, Tanti Novianti

Analisis Strategi Optimasi Mutu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor

Mochamad Ramdani, Dwi Rachmina, Anna Fariyanti

Strategi Optimasi Promosi Dalam Upaya Peningkatan Investasi Swasta Di Kabupaten Bogor

Nina Widyani, A Faroby Falatehan, Himawan Hariyoga

Optimasi Kinerja Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aek Nauli Di Sumatera Utara

Hendry Elvin Simamora, Manuntun Parulian Hutagaol, Irdika Mansur

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rosy Novriyandi, Dedi Budiman Hakim, Ernan Rustiadi

Strategi Keberlanjutan Dalam Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Bogor

Judo Satria, A Faroby Falatehan, Irfan Syauqi Beik



Kerjasama

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) IPB
Perhimpunan Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)

Jurnal MPD. Volume 12 Nomor 1, Juli 2024

Penanggung Jawab

Dr. A Faroby Falatehan, SP., ME

(Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor)

Dewan Redaksi

Ketua : Dr. A Faroby Falatehan, SP., ME
Manager Editor : Dr. Deni Lubis, S. Ag., MA
Team Editorial : Dr. Ir. Lukman M Baga, MS
Hendra Khaerizal, SP., M. Si
Dr. Widhianthini, SP., M. Si
Nurul Hilmiyah, SE., M. Ec., Ph. D
Redaksi Pelaksana : Lia Deliani, SM
Supriyadi

Reviewer Internal

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec
Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda
Prof. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec
Prof. Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS
Prof. Dr. Ir. Lala M Kolopaking, MS
Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr
Prof. Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.A.Ec
Prof. Dr. Ir. Ma'mun Sarma, MS, M.Si
Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc
Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si
Dr. Nia Kurniawati Hidayat, SP, M.Si
Dr. Nuva, SP, M.Si

Alamat Redaksi

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper, Wing 5 Level 4, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Tlp/Fax : +62 - 251 - 862 - 9342 | Mobile : +62 - 812 - 82 - 744 - 530
Website : <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd>
E-mail : jurnalmpd@apps.ac.id

ARTIKEL

- Strategi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Kepulauan Anambas**
Lenny Romauli Marpaung, Hermanto Siregar, Tanti Novianti 1 - 9
- Analisis Strategi Optimasi Mutu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor**
Mochamad Ramdani, Dwi Rachmina, Anna Fariyanti 10 - 18
- Strategi Optimasi Promosi Dalam Upaya Peningkatan Investasi Swasta Di Kabupaten Bogor**
Nina Widyani, A Faroby Falatehan, Himawan Hariyoga 19 – 28
- Optimasi Kinerja Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aek Nauli Di Sumatera Utara**
Hendry Elvin Simamora, Manuntun Parulian Hutagaol, Irdika Mansur 29 – 37
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
Rosy Novriyandi, Dedi Budiman Hakim, Ernan Rustiadi 38 – 48
- Strategi Keberlanjutan Dalam Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Bogor**
Judo Satria, A Faroby Falatehan, Irfan Syauqi Beik 49 - 55

Jurnal manajemen pembangunan daerah (JMPD) adalah media ilmiah penyebaran utama hasil-hasil penelitian sosial - ekonomi dalam lingkup pembangunan daerah dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pemberi informasi bagi pengambil kebijakan, praktisi dan pemerhati pembangunan daerah. Jurnal MPD diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB bekerjasama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

STRATEGI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lenny Romauli Marpaung¹, Hermanto Siregar², Tanti Novianti³

¹Mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

²Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACT

The Anambas Islands is one of the regions in the Riau Islands province with a vast proportion of sea, accounting for 98.74 percent of its total area. Through the mechanism of decentralization, most of the functions of marine and fisheries gradually become part of the affairs of the district/city. The transfer of authority is accompanied by the transfer of financing through a balance fund, so that with the increasing funds managed by the region, it is expected that the development of marine and fisheries will improve. DAK is one of the fiscal instruments of the balance fund, which plays an important role in achieving national priority areas (DJPK 2016). As noted by BAPPENAS (2013) in the national development priorities 2015-2019, the main issues and challenges in the development of marine and fisheries are suboptimal production infrastructure, namely in the capture fleet, ports, agricultural roads, land, and access to business development (capital and markets). The aim of this research is to formulate strategies for managing the Special Allocation Fund (DAK) in the marine and fisheries sector from 2011 to 2016 in the Anambas Islands Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Based on the AHP method, the priority strategies include the evaluation of regulations related to DAK management, the placement of support personnel, socialization and law enforcement, improving coordination systems, and forming Joint Business Groups.

Keywords: Analysis Hierarchy Process, Special Allocation Fund, Marine, Fisheries, Strategy

ABSTRAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kepulauan Anambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki proporsi laut sekitar 98,74 persen dari luas wilayah. Melalui mekanisme desentralisasi, sebagian besar fungsi kelautan dan perikanan secara bertahap menjadi bagian dari urusan daerah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan pembiayaan melalui dana perimbangan, sehingga dengan semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh daerah, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. DAK merupakan salah satu instrumen fiskal dana perimbangan, yang mengambil peranan penting dalam pencapaian bidang prioritas nasional (DJPK 2016). Sebagaimana dicatat oleh BAPPENAS (2013) dalam prioritas pembangunan nasional 2015-2019, isu permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah infrastruktur produksi yang belum optimal, yaitu pada armada penangkapan, pelabuhan, jalan usaha tani, lahan dan akses pengembangan usaha (modal dan pasar). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2011-2016 di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode AHP diperoleh urutan prioritas strategi yaitu evaluasi regulasi terkait pengelolaan DAK, penempatan tenaga pendamping, sosialisasi dan penegakan hukum, meningkatkan sistem koordinasi serta membentuk Kelompok Usaha Bersama.

Kata Kunci: Analysis Hierarchy Process, Dana Alokasi Khusus, Kelautan, Perikanan, Strategi

1. PENDAHULUAN

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA). Subkategori pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di KKA, diikuti dengan subkategori perikanan. Peranan subkategori perikanan terhadap PDRB relatif menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun (Tabel 1). Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dari para pelaku subsektor kelautan dan perikanan dibandingkan subsektor lainnya pada kelompok lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Meningkatnya peranan ini juga menunjukkan bahwa subsektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi khususnya di KKA.

Tabel 1. Peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Anambas (persen)

| Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 52.10 | 50.90 | 50.09 | 50.63 | 50.69 |
| Kehutanan | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.13 |
| Perikanan | 46.66 | 47.96 | 48.79 | 48.27 | 48.19 |

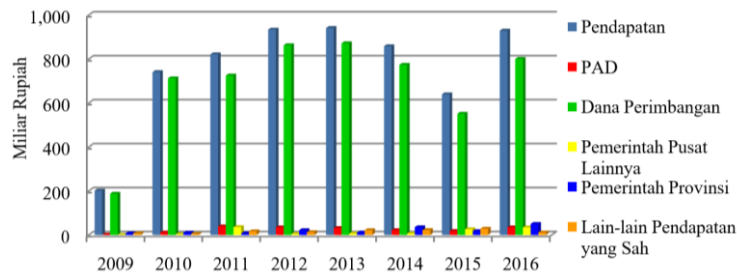
Sumber: BPS KKA (2016)

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Dana perimbangan di (KKA) merupakan jenis transfer yang terbesar selama delapan tahun anggaran berturut-turut dalam struktur pendapatan daerah (Gambar 1). Hal ini dikarenakan KKA merupakan kabupaten

termuda di Provinsi Kepulauan Riau (Kemenkumham 2008) dan masih berada dalam usaha untuk mengatasi persoalan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal.

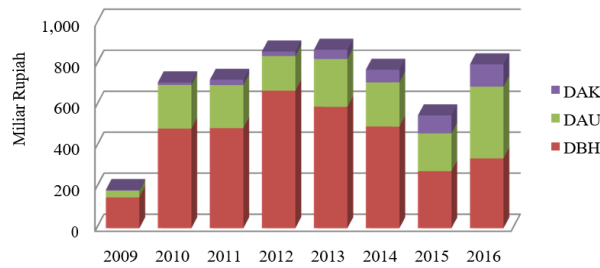


Sumber: Laporan realisasi APBD KKA tahun 2009-2016

Gambar 1. Grafik struktur realisasi pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Dana perimbangan, baik dalam bentuk dana transfer umum maupun transfer khusus di KKA cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Proporsi dana transfer khusus, yaitu DAK adalah yang paling rendah dalam struktur pendapatan dana perimbangan (Gambar 2). Nilai rata-rata DAK selama delapan tahun adalah 7 persen dari total dana

perimbangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), DAK tercatat sebagai pengeluaran pemerintah, sebagai komponen belanja di daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi anggaran dan belanja DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KKA tahun 2009-2016

Gambar 2. Grafik proporsi dana perimbangan daerah Kepulauan Anambas

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk reformasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam era otonomi daerah. Melalui mekanisme desentralisasi, sebagian besar fungsi kelautan dan perikanan secara bertahap menjadi bagian dari urusan daerah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan pembiayaan melalui dana perimbangan, sehingga dengan semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh daerah, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. DAK merupakan salah satu instrumen fiskal dana perimbangan, yang mengambil peranan penting dalam pencapaian bidang prioritas nasional (DJPK 2016). Sebagaimana dicatat oleh BAPPENAS (2013) dalam prioritas pembangunan nasional 2015-2019, isu permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah infrastruktur produksi yang belum optimal, yaitu pada armada penangkapan, pelabuhan, jalan usaha tani, lahan dan akses pengembangan usaha (modal dan pasar).

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan agar visi nasional di bidang kelautan dan perikanan dapat tercapai. Strategi menjadi sebuah keputusan penting yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan, yaitu data terkait DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA

Data dan informasi tersebut antara lain berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah (RPJP/RPJMD)

karena tidak selamanya implementasi yang dilakukan berjalan dengan lancar. Strategi diperlukan untuk memperoleh hasil terbaik yang bisa diperoleh dalam keterbatasan sumberdaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Maret sampai Juli 2017 di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani fungsi terkait, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kunjungan kepada responden/*stakeholder* yang dipilih dengan teknik *non probability sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2013). Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber baik internal maupun eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari instansi dimana penelitian dilakukan,

Kabupaten Kepulauan Anambas. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar instansi penelitian dilakukan, antara lain berasal dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan,

Peraturan Menteri Keuangan, Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pustaka publikasi melalui jurnal, buletin, white paper dan terbitan lainnya yang terkait dengan data dan informasi DAK bidang kelautan dan perikanan.

Metode Pemilihan Responden

Model AHP didesain untuk menangkap persepsi lebih dari satu subjek yang memiliki kaitan erat dengan suatu objek permasalahan, secara rasional (Falatehan 2016). Kriteria subjek yang dipilih antara lain, mengerti akan permasalahan yang dikaji, merasakan sendiri akibat masalah tersebut atau

Metode Analisis Data

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode analisis dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KAA adalah dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process*. *Analytical Hierarchy Process* adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya (Permadi 1992). Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam sebuah suatu hirarki (Marimin 2010). Tingkat kepentingan suatu variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dan secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ahli (*expert*) sebagai input utamanya.

Penentuan tujuan pengambilan keputusan dilakukan di awal, yaitu untuk menentukan strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di

memiliki kepentingan terhadap masalah. Teknik *sampling* yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). *Judgement expert* yang dipilih terdiri dari 6 orang, yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan di Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

KKA agar lebih efektif. Langkah selanjutnya menentukan faktor yang dapat menjadi titik permasalahan dari tujuan utama, kemudian kendala, selanjutnya menetapkan kemungkinan alternatif kebijakan. Hirarki yang disusun ada lima level yang terdiri dari "tujuan" yaitu strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas; empat "faktor" yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan; lima "aktor" yaitu pemda Kepulauan Anambas, penyuluh/POL, masyarakat, penyedia barang dan penerima manfaat; lima "kendala" yaitu regulasi daerah, sarana dan prasarana, anggaran, SDM dan komitmen pelaku; dan lima "alternatif strategi" yaitu evaluasi regulasi daerah, meningkatkan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dengan kementerian teknis, penempatan tenaga pendamping atau petugas operasional lapangan, sosialisasi dan penegakan hukum dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB).

melakukan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga nelayan baik nelayan tangkap maupun budidaya berjumlah 4.078 orang. Produksi perikanan tangkap sebanyak 1.454,39ton dan produksi budidaya sebanyak 62,91 ton. Sementara, luas baku lahan usaha budidaya tahun 2011 sebanyak 28.980 m² dengan jumlah pembudidaya sebanyak 1.716 rumah tangga. Hasil produksi perikanan tangkap selain didistribusikan di pasar ikan juga diekspor ke luar negeri antara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pengembangan Wilayah Perikanan dan Kelautan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 98,73 persen merupakan wilayah lautan sehingga kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya lebih memilih penangkapan ikan sebagai sektor utama dalam

lain ke Hongkong dan Singapura. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, potensi sumberdaya ikan di Perairan Kepulauan Anambas dan sekitarnya diestimasi berjumlah 62.853,4 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 50.282,7 ton/tahun. Potensi tersebut diasumsikan berada

Analisis Pertumbuhan Belanja DAK

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk naik, namun pada belanja DAK bidang kelautan dan perikanan pertumbuhan berfluktuasi, mengalami pertumbuhan positif dan negatif yang cenderung bergantian (Tabel 2). Pada tahun 2012 belanja DAK mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,69 persen dari

pada perairan 0 sampai 12 mil. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan yang ada, potensi terbesar adalah potensi cumi-cumi yaitu 20.848,2 ton/tahun, berikutnya jenis ikan pelagis kecil dengan potensi sebesar 17.450,7 ton/tahun dan lobster sebesar 10.346,9 ton/tahun.

tahun 2011. Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja DAK mengalami penurunan sebesar 6,22 persen dari tahun 2012 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 35,47 dari tahun 2013. Pada tahun 2015, pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 78,48 persen dari tahun 2014 dan mengalami perlambatan pertumbuhan drastis pada tahun 2016, yaitu sebesar 82,12 persen dari tahun 2015.

Tabel 2. Analisis pertumbuhan belanja DAK

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Penyerapan (%) | Efisiensi (%) | Pertumbuhan Belanja (%) |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 2011 | 5.751.995.571 | 4.260.536.956 | 74,07 | 25,93 | |
| 2012 | 6.884.604.000 | 3.689.338.000 | 53,59 | 46,41 | 19,69 |
| 2013 | 6.456.270.000 | 6.019.188.256 | 93,23 | 6,77 | 6,22 |
| 2014 | 4.166.537.000 | 3.764.920.300 | 90,36 | 9,64 | 35,47 |
| 2015 | 7.436.537.616 | 6.051.105.190 | 81,37 | 18,63 | 78,48 |
| 2016 | 1.329.680.000 | 1.285.610.500 | 96,69 | 3,31 | 82,12 |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah (2011-2016)

Tingkat pertumbuhan belanja DAK dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu anggaran yang ditetapkan, jumlah program dan penyerapan anggaran pada tiap kegiatan. Pagu anggaran pada tahun 2015 lebih besar dan pagu anggaran pada tahun 2016 lebih kecil, besar kecilnya pagu anggaran ini tergantung pada jumlah program atau kegiatan dalam program yang diusulkan. Pada tahun 2015 jumlah program yang didanai berjumlah 6 program, jika dibandingkan dengan yang lain, pada tahun 2011, 2013 dan 2014 yang hanya terdiri dari 5 program. Pada tahun 2016 program yang didanai dengan DAK bidang kelautan dan perikanan berjumlah 1 program.

Tingkat penyerapan anggaran mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah berturut-turut tahun 2016, 2013, 2014, 2015, 2011 dan 2012. Perbedaan tingkat penyerapan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sumber daya input, sumber daya manusia, keadaan alam, mekanisme pelaksanaan dan target yang ditetapkan. Faktor terbesar yang

mempengaruhi penyerapan adalah sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

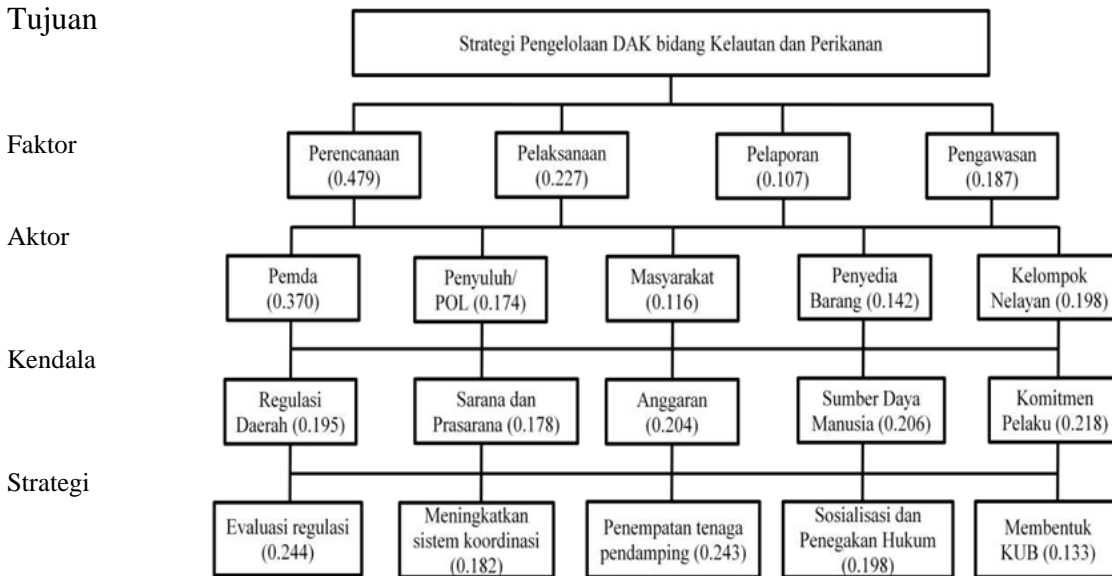
Data efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi terbesar terjadi pada tahun 2012, namun efisiensi tidak selalu diartikan sebagai penghematan anggaran. Dalam hal ini, efisiensi yang besar terjadi karena terdapat beberapa kegiatan atau program yang tidak terlaksana sehingga realisasi anggaran menjadi kecil dan penyerapan anggaran rendah. Sebaliknya, efisiensi terendah terjadi pada tahun 2016 diikuti tahun 2013. Interpretasi efisiensi yang rendah dalam hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satuan perangkat daerah relatif baik. Kemampuan pemerintah untuk merealisasikan anggaran dan target-targetnya menjadi sangat penting. Rendahnya realisasi dalam belanja publik mengindikasikan bahwa program dan aktivitas pemerintah pada tahun tersebut sedikit,

sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai dengan harapan (Fahlevi dan Ananta 2015).

Analisis Strategi Pengelolaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Perumusan strategi Pengelolaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dalam metode AHP disusun hirarki yang mencakup lima level, yaitu tujuan, faktor, aktor, kendala dan strategi atau alternatif kebijakan (Gambar 3). Level pertama merupakan fokus perumusan strategi, yaitu pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan. Level kedua adalah faktor yang terdiri dari komponen terkait yang mempengaruhi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan. Komponen faktor terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, Tujuan

pengawasan dan pelaporan. Level ketiga adalah aktor yang terlibat di dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan adalah pemerintah daerah, penyuluh atau petugas operasional lapangan, masyarakat, penyedia barang dan kelompok nelayan. Level keempat merupakan kendala atau keterbatasan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan. Komponen kendala terdiri dari regulasi daerah, sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia dan komitmen pelaku. Level terakhir merupakan strategi yang terdiri dari alternatif kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan agar lebih efektif.



Sumber: Data primer (2017)

Gambar 3. Struktur dan nilai bobot hirarki AHP strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa faktor utama pengelolaan DAK adalah perencanaan dengan nilai 0.479. Hal ini dikarenakan perencanaan adalah proses terpenting untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (PP 2008). Faktor penentu berikutnya adalah pelaksanaan dengan nilai 0.227 diikuti dengan pengawasan dengan nilai 0.187 dan pelaporan 0.107.

Hasil pengolahan horizontal pada pelaku pengelolaan DAK dalam faktor

perencanaan adalah pemerintah daerah, dengan nilai 0.387. Pelaku utama dalam pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA adalah pemerintah daerah, dengan nilai berturut-turut 0.392; 0.356; dan 0.309. Dari hasil rekapitulasi untuk urutan pertama pelaku pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA adalah pemerintah daerah dengan nilai 0.361. Hal ini dikarenakan pemerintah lokal dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya, sehingga keputusan yang diambil akan sangat

responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sidik 2002).

Kendala utama dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA berdasarkan hasil analisis AHP adalah komitmen pelaku. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses perencanaan, usulan masyarakat kerap tidak diperhitungkan dan tidak dimuat dalam dokumen perencanaan. Suwardi dan Utomo (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dengan kata lain dari segi organisasi, *stakeholder* yang berkomitmen tinggi cenderung menghasilkan kinerja yang optimal.

Hasil pengolahan horizontal untuk alternatif kebijakan dalam pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA adalah dengan melakukan evaluasi regulasi. Evaluasi regulasi menjadi prioritas utama dengan nilai 0.244. Hal ini dikarenakan evaluasi penting untuk mengetahui apa saja yang telah

dilakukan, yang belum dilakukan dan sejauh mana pelaksanaannya sehingga dapat diambil keputusan untuk langkah yang harus dilakukan berikutnya. Zanakis *et al.* 1995 menyatakan bahwa hampir seluruh organisasi mengalami permasalahan yang memerlukan evaluasi perencanaan program atau kegiatan yang berkaitan dengan rendahnya sumberdaya, baik anggaran, manusia, pendukung.

Alternatif yang menjadi pilihan berikutnya adalah penempatan tenaga pendamping dengan nilai 0.241. Tenaga pendamping berupa penyuluh atau petugas operasional lapangan sangat dibutuhkan mengingat kondisi daerah KKA merupakan gugus kepulauan sehingga keberadaan tenaga pendamping akan memperpendek rentang kendali antara satuan kerja, baik dinas maupun unit pelaksana teknis dengan masyarakat maupun penerima manfaat DAK bidang kelautan dan perikanan.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari alternatif yang dikemukakan sesuai dengan prioritas AHP agar pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas lebih efektif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi regulasi berarti meninjau ulang peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan DAK yang lebih efektif. Proses evaluasi program atau kegiatan serta implementasinya yang cukup dikenal adalah mengikuti tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, evaluasi, seleksi, alokasi dan implementasi (Zanakis *et al.* 1995).
- b. Penempatan tenaga pendamping atau petugas operasional lapangan di setiap kecamatan atau ruang lingkup yang lebih kecil dapat memperpendek rentang kendali pembinaan dan pengawasan DAK. Kondisi geografis yang berbentuk gugusan kepulauan dapat menjadi faktor pembatas dalam usaha melakukan peninjauan langsung. Dengan adanya tenaga pendamping, kualitas pembinaan

dan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan optimal.

- c. Sosialisasi dan penegakan hukum diperlukan untuk mendukung pengelolaan DAK terutama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengelolaan barang atau aset daerah yang bersumber dari DAK bidang kelautan dan perikanan. Disarankan agar adanya pembinaan terus menerus terhadap sikap dan perilaku agen (pemerintah) dalam bekerja sehingga sasaran kerja tercapai sesuai yang telah ditentukan dan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku sehingga sistem pengelolaan DAK berjalan dengan baik.
- d. Meningkatkan sistem koordinasi, konsultasi dan konsolidasi. Effendy (2013) menyatakan bahwa suatu sistem kerja yang dapat mempengaruhi ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dapat diciptakan tidak hanya dengan melakukan pembinaan mental namun juga dengan peningkatan penggunaan suatu sistem yang dapat menjangkau tingkat pemerintahan yang berbeda.

e. Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan wadah bagi pelaku kegiatan kelautan dan perikanan yang beranggotakan para nelayan baik nelayan tangkap, budidaya dan pengelola

perikanan. KUB diperlukan untuk mendukung pengelolaan DAK terutama dalam pemberian barang yang bersumber dari belanja DAK agar lebih tepat sasaran.

Rencana Implikasi Kebijakan

Tabel 3. Rencana strategi implikasi kebijakan

| No | Strategi | Kegiatan | Pelaksana |
|----|--|--|---|
| 1 | Evaluasi regulasi | Identifikasi regulasi terkait pengelolaan DAK, seleksi dan alokasi regulasi yang belum terperinci, membuat usulan rancangan regulasi yang diperlukan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan |
| 2 | Meningkatkan sistem koordinasi, konsultasi dan konsolidasi | Membangun sistem koordinasi pengelolaan DAK dengan Kementerian dan Unit Layanan Pengadaan | Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| 3 | Penempatan tenaga pendamping | Bimbingan teknis tenaga pendamping dan penempatan satu pendamping satu desa | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbe Daya Manusia; Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan |
| 4 | Sosialisasi dan penegakan hukum | Membangun zona integritas menuju <i>stakeholder</i> taat hukum | Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan |
| 5 | Membentuk KUB | Membentuk forum tematik Bersama masyarakat nelayan/perikanan | Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan |

Sumber: Data primer (2017), diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis belanja DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas diketahui bahwa anggaran dan pertumbuhan belanja terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan 6 program DAK. Belanja dengan varians terbesar terdapat pada tahun 2016 dengan 1 program.
2. Alternatif strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA berdasarkan hasil analisis AHP sesuai urutan prioritasnya yaitu evaluasi regulasi terkait pengelolaan DAK, penempatan tenaga pendamping, sosialisasi dan penegakan hukum, meningkatkan sistem koordinasi serta membentuk Kelompok Usaha Bersama.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. SDM penyusun laporan DAK atau sub bagian program perlu ditingkatkan kompetensinya agar mampu

mengumpulkan, membaca dan menganalisis data kinerja secara keseluruhan sehingga menjamin kualitas data laporan.

2. Perlu penetapan target outcome DAK secara konkret dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan metode perhitungan tertentu dan pencatatan pencapaiannya sehingga efektivitas dapat diukur dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

[BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015- 2019*. Jakarta (ID): Direktorat Kelautan dan Perikanan.

[BPS KKA] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. 2015. *Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2015*. Tarempa (ID): BPS Kabupaten Kepulauan Anambas.

Brodjonegoro B, Martinez-Vazquez J. 2005. *An Analysis of Indonesia's transfer*

- system: recent performance and future prospects. Economics Faculty Publications. Atlanta (USA): Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Effendy Y. 2013. Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor). *J Manajemen dan Bisnis*. 13(1):46-55.
- Falatehan AF. 2016. *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta (ID): Indomedia Pustaka.
- [KKA] Kabupaten Kepulauan Anambas. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005-2025. Tarempa (ID): Bappeda KKA.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Zanakis SH, Mandakovic T, Gupta SK, Sahay S, Hong S. 1995. A review of program evaluation and fund allocation methods within the service and government sectors. *Socio-Econ Plann Sci*. 29(1):59-79.



ANALISIS STRATEGI OPTIMASI MUTU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Mochamad Ramdani¹, Dwi Rachmina², Anna Fariyanti³

¹Mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

²Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACT

The local government, as a budget user institution, is responsible for realizing transparency and accountability in financial management by submitting accountability reports in the form of financial statements that will be audited by the Supreme Audit Agency (BPK). The audit results report (LHP) of the Bogor City Government's financial statements from 2006 to 2015 received a disclaimer opinion (WDP) from the BPK, indicating that the financial statements of the Bogor City Government have not yet reached the highest predicate in the form of an unqualified opinion (WTP). This study aims to analyze the quality of the financial statements of the Bogor City Government and formulate strategies to improve the quality of financial statements in the Bogor City Government. The analysis used in the first objective of this study is the descriptive method, while the second objective uses the SWOT analysis method. The study results show that (1) the quality of the local government financial statements (LKPD) of the Bogor City Government is fairly good; (2) clear job descriptions for financial managers are the main strength factor, while the lack of knowledge transfer about financial management is the dominant weakness factor, open selection for occupying position of echelon II is the highest opportunity factor, and the moratorium on the recruitment of human resources for the regional financial management apparatus through the selection of civil servants is the highest challenge factor.

Keywords: Finance, Quality, Strategy, Human Resources, SWOT

ABSTRAK

Pemerintah daerah sebagai institusi pengguna anggaran bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dari tahun 2006 s.d. 2015 mendapatkan opini WDP oleh BPK, hal ini mencerminkan laporan keuangan Pemkot Bogor belum mencapai predikat tertinggi berupa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor dan merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemkot Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan: (1) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkot Bogor masuk kriteria cukup baik; (2) Tupoksi yang jelas bagi pengelola keuangan merupakan faktor kekuatan yang utama, minimnya *transfer knowledge* tentang pengelolaan keuangan merupakan faktor kelemahan yang mendominasi, adanya seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan eselon II merupakan faktor peluang yang tertinggi dan adanya moratorium dalam perekrutan SDM aparatur pengelola keuangan daerah melalui seleksi ASN merupakan faktor tantangan yang tertinggi.

Kata Kunci: Keuangan, Kualitas, Strategi, Sumber Daya Manusia, SWOT

PENDAHULUAN

Bergulirnya era reformasi membawa suatu perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan yaitu berupa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, dapat digunakan sebagai indikator dalam

menerapkan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada instansi pemerintah telah diterapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dengan karakteristik berupa: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai salah satu institusi pemerintah, wajib melaksanakan aturan tersebut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang diterbitkan oleh Pemda akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan akan diberikan opini pemeriksaan dapat berupa: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Kota Bogor merupakan kota yang berada di Pulau Jawa dan dekat dengan ibukota dengan segala kapasitas yang ada baik SDM, anggaran, dan aset yang dimiliki guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya termasuk upaya penciptaan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kualitas LKPD yang diterbitkan. Namun hal tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada, semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 LKPD Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Hal ini mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum mencapai tingkat terbaik karena penilaian yang diberikan BPK sampai dengan tahun 2015 belum pernah mendapat opini WTP.

Hasil pemeriksaan LHP terakhir Pemkot Bogor Tahun 2015 mendapat predikat WDP dikarenakan daftar akun yang disajikan tidak sesuai SAP, khususnya pada akun aset lancar selain kas dan akun aset tetap. Pada hasil pemeriksaan LHP tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Bogor terkendala pada pencatatan aset tetap dan aset lainnya (BPK 2016). Hal tersebut menjadi penyebab LHP yang diterbitkan Pemkot Bogor belum mendapatkan opini WTP dari BPK, dan mengungkap adanya keterkaitan peran dari kompetensi SDM, penerapan sistem pengendalian intern dan

sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas LKPD.

Menyusun laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang berkompeten dalam melaksanakannya, baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. SDM juga melaksanakan pengendalian intern dalam aktivitas kegiatan pekerjaan pegawai sehari-hari. Unsur-unsur tersebut akan saling mempengaruhi guna mendukung terciptanya LKPD yang baik dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan penilaian dari BPK. Berdasarkan uraian tersebut diperlukan kajian untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kualitas LKPD pada Pemkot Bogor.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemkot Bogor, Provinsi Jawa Barat dikarenakan Pemkot Bogor salah satu Pemda yang selama sepuluh tahun (2006 s.d. 2015) belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Survei dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan (Kasubbag Keuangan) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Bogor. Penelitian dilakukan selama bulan Maret 2017 hingga Agustus 2017.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 SKPD yaitu: Kasubbag keuangan; Bendahara pengeluaran/penerimaan dan Operator aplikasi pada Perangkat Daerah Kota Bogor sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 20 Dinas, 4 Badan, dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja. Dari populasi pengelola keuangan diambil sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kasubbag Keuangan di setiap SKPD merupakan orang yang bertanggungjawab penuh terhadap laporan keuangan SKPD yang dibuatnya. Sampel dalam penelitian ini adalah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Pemuda dan Olah Raga; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pendidikan; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Inspektorat; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner, sedangkan untuk

mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap literatur terkait.

Metode Analisis Data

Jenis data yang digunakan pada tahap awal adalah mengolah sumber data primer yang didapatkan dari hasil kuesioner yang dimintakan kepada Kasubbag Keuangan pada masing-masing SKPD, selanjutnya memetakan faktor internal yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan serta memetakan faktor eksternal yang akan menjadi peluang dan tantangan. Langkah selanjutnya melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan alternatif strategi.

Analisis Rating Scale

Pengolahan data akan dilakukan dengan melakukan klasifikasi hasil jawaban kedalam kelas interval yang diolah dari perhitungan skala likert. Menurut Djaali (2008) menyatakan bahwa skala likert merupakan skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena tertentu.

Tabel 1. Skala likert

| Pernyataan | Nilai |
|-------------------|-------|
| Sangat Baik | 4 |
| Cukup Baik | 3 |
| Kurang Baik | 2 |
| Sangat Tidak Baik | 1 |

Sumber: Sugiyono (2013)

Adapun penetapan kriteria skor jawaban responden terhadap skor ideal ke dalam interval dengan kriteria seperti tersaji pada pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria penilaian

| No. | Interval Penilaian (Skor) | Kriteria |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 1 | 4 | Sangat Baik |
| 2 | 3.00-3.99 | Cukup Baik |
| 3 | 2.00-2.99 | Kurang Baik |
| 4 | 1.00-1.99 | Sangat Tidak Baik |

Sumber: Sugiyono (2013)

Analisis SWOT

Langkah pertama dalam analisis SWOT diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal yang dianggap berpengaruh

terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemkot Bogor. Kemudian dilakukan pendekatan analisis SWOT dengan interaksi matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE), untuk memperoleh beberapa alternatif strategi yang paling sesuai/dominan menurut skala prioritasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Kualitas Laporan Keuangan

Rata-rata skor pengukuran pada kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor dan elemen pendukungnya sebesar 3,46 termasuk dalam kriteria cukup baik dan sangat baik (Tabel 3). Rata-rata skor 3,46 (Tabel 3) termasuk kategori interval cukup baik. Pada variabel kompetensi SDM pengelola keuangan terdapat tiga indikator, yaitu: (1) Pengetahuan; (2) Keterampilan; dan (3) Sikap mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,21 (Tabel 3) masuk kriteria cukup baik, hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikan responden yang mendominasi tingkat pendidikan sarjana

Tabel 3. Hasil pengukuran kualitas laporan keuangan di Pemkot Bogor

| Variabel | Rata-rata Pengukuran |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Kompetensi SDM Pengelola Keuangan | 3.21 |
| 2. Penerapan SPIP | 3.60 |
| 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah | 3.60 |
| 4. Laporan Keuangan | 3.38 |
| Rata-rata | 3.46 |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Pada variabel penerapan SPIP terdapat lima indikator, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan/aktivitas pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) Pemantauan mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,60 (Tabel 3) masuk dalam kategori cukup baik. Hal yang belum baik pada penerapan SPIP diantaranya masih rendahnya penilaian risiko yang dilakukan oleh Pemkot Bogor sebagai alat mitigasi terjadinya pelanggaran atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah serta masih minimnya komunikasi dan informasi terkait dengan pelaporan keuangan antara SKPD dengan pengawasan internal dan BPKAD selaku pengelola keuangan daerah.

Dari sisi variabel penerapan SIKD yang dengan tiga indikator, yaitu: (1) Sarana pendukung; (2) Pemeliharaan teratur; dan (3) Kemajuan informasi komunikasi mendapatkan skor rata-rata yang cukup besar senilai 3,60 (Tabel 3) masuk kategori cukup baik. Direncanakan pada tahun anggaran 2018 Pemkot Bogor akan menggunakan aplikasi yang lebih modern dan terintegrasi yaitu aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Aplikasi ini terintegrasi baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya

sehingga menjadi angka penilaian yang cukup baik dalam sisi kompetensi. Hal yang belum baik pada kompetensi SDM pengelola keuangan terkait dengan pengalaman responden dalam menduduki jabatan pengelola keuangan yang mendominasi pengalaman masih dibawah lima tahun dan mayoritas responden belum mengikuti diklat terkait pengelola keuangan sehingga berdampak pada skor yang mengurangi nilai kompetensi SDM sehingga kategori penilaian kompetensi SDM pengelola keuangan belum mendapatkan nilai sangat baik.

serta telah digunakan oleh beberapa Pemda di seluruh Indonesia. Dari sisi jaringan, aplikasi yang saat ini digunakan Pemkot Bogor sudah terkoneksi secara real-time, sehingga dapat menjadi sisi baik bagi peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor.

Pada variabel laporan keuangan dengan empat indikator sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, yaitu: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; dan (4) Dapat dipahami mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,38 (Tabel 3) masuk kategori cukup baik. Rendahnya nilai rata-rata skor tersebut disebabkan dari sisi relevan, informasi laporan keuangan yang digunakan belum dapat sebagai alat prediksi anggaran kedepan dalam jangka menengah dan kurangnya dalam ketepatan waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dari sisi keandalan, dokumen pendukung dalam pembuatan laporan keuangan belum tersedia secara lengkap dan masih adanya bias dan kesalahan material dari laporan keuangan yang dihasilkan serta masih terdapat keterpihakan pada pihak tertentu dalam penyajian laporan keuangan. Sementara itu, adanya perubahan sistem ke basis akrual dari sebelumnya kas menuju akrual (CTA) diawal tahun 2015 sehingga kebijakan dan informasi laporan keuangan yang saat ini dihasilkan akan berbeda dengan laporan keuangan sebelum

tahun 2015 dalam artian hanya dapat dibandingkan pada dua tahun anggaran terakhir saja. Di sisi lain, Pemkot Bogor dalam menyajikan laporan keuangan belum dapat dipahami oleh khalayak masyarakat umum. Dari sisi kekurangan tersebut, Pemkot Bogor mempunyai nilai baik dari sisi telah mengikuti prosedur yang telah ditentukan terutama mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 dan juga telah membuat peraturan tentang prosedur pelaksanaan APBD setiap tahunnya sebagai panduan dalam proses pelaksanaan keuangan daerah dan tentunya sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Perumusan Strategi

Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Terdapat dua faktor yang penting menjadi tujuan yang hendak dijangkau dari persepsi para ahli yaitu faktor kunci internal

Tabel 4. Faktor internal peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor tahun 2017

| No | Faktor Internal | Bobot | Rating | Skor |
|----------------------------|--|--------|--------|--------------|
| Kekuatan | | | | |
| 1 | Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan sudah jelas | 0.1056 | 3.50 | 0.369 |
| 2 | Tupoksi yang jelas bagi pengelola keuangan | 0.1222 | 3.00 | 0.367 |
| 3 | Ketersediaan sarana pendukung penyusunan laporan keuangan yang memadai | 0.0972 | 3.25 | 0.316 |
| 4 | Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan keuangan sudah jelas | 0.1028 | 3.50 | 0.360 |
| 5 | Komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah sangat kuat | 0.1028 | 3.50 | 0.360 |
| Jumlah Skor Kekuatan | | | | 1.772 |
| Kelemahan | | | | |
| 6 | Pelatihan dan sosialisasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kurang memadai | 0.0861 | 3.75 | 0.323 |
| 7 | Ketiadaan evaluasi pasca diklat pengelolaan keuangan | 0.1097 | 3.50 | 0.384 |
| 8 | Minimnya <i>transfer knowledge</i> tentang pengelola keuangan | 0.1153 | 3.25 | 0.375 |
| 9 | Lemahnya kompetensi aparatur pengelola keuangan | 0.0722 | 3.75 | 0.271 |
| 10 | Ketidaksesuaian pola mutasi/promosi pejabat/pegawai pengelola keuangan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi pegawai | 0.0861 | 3.75 | 0.323 |
| Jumlah Skor Kelemahan | | | | 1.675 |
| Total Skor Internal | | | | 3.447 |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Berdasarkan Tabel 4, faktor kunci internal menghasilkan dua elemen faktor penting yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Total skor internal adalah

(IFE) dan faktor kunci eksternal (EFE) yang dimiliki oleh Pemkot Bogor. Analisis SWOT melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menghasilkan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun disisi lain meminimalkan kelemahan dan tantangan (Rangkuti 2014).

Penentuan skor bobot dan rating berdasarkan hasil dari kuesioner yang disebarakan kepada pejabat tertentu yang memiliki kewenangan dan pengetahuan yang mendukung terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Total skor IFE dan EFE didapatkan dari penjumlahan skor yang dihasilkan dari perkalian antara bobot dan rating.

penjumlahan dari skor kekuatan dan skor kelemahan. Dari perhitungan tersebut, total skor untuk faktor internal sebesar 3.447.

Tabel 5. Faktor Eksternal peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor tahun 2017

| No | Faktor Eksternal | Bobot | Rating | Skor |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------------|
| Peluang | | | | |
| 11 | Kerjasama dengan lembaga BPKP dalam review LKPD sudah terjalin dengan baik | 0.1833 | 3.25 | 0.596 |
| 12 | Terdapat <i>reward</i> terhadap kualitas LKPD dengan opini WTP | 0.1292 | 1.50 | 0.194 |
| 13 | Terdapat seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan eselon II (<i>talent pool</i>) | 0.2125 | 3.25 | 0.691 |
| Jumlah Skor Peluang | | | | 1.480 |
| Tantangan | | | | |
| 14 | Moratorium dalam perekrutan SDM aparatur pengelola keuangan daerah melalui seleksi ASN | 0.1750 | 3.25 | 0.569 |
| 15 | Perubahan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah | 0.1667 | 3.00 | 0.500 |
| 16 | Adanya hukuman terkait keterlambatan penyusunan APBD | 0.1333 | 2.25 | 0.300 |
| Jumlah Skor Tantangan | | | | 1.369 |
| Total Skor Eksternal | | | | 2.849 |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Berdasarkan Tabel 5, faktor kunci eksternal menghasilkan dua elemen faktor penting yaitu faktor peluang dan faktor tantangan. Untuk total skor eksternal adalah penjumlahan dari skor peluang dan skor tantangan. Total skor untuk faktor eksternal sebesar 2.849. Hasil skor tersebut akan dipetakan pada matrik Internal- Eksternal (*IE Matrix*).

Matriks Internal-Eksternal memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan sembilan sel. Matrik IE didasarkan pada dua dimensi kunci: skor bobot IFE total pada sumbu x dan skor bobot EFE total pada sumbu y. Skor bobot total yang diperoleh dari divisi-divisi tersebut memungkinkan susunan Matrik IE di tingkat perusahaan. Pada sumbu x dari Matrik IE, skor bobot IFE total 1.0–1.99 menunjukkan posisi internal yang lemah, skor 2.0– 2.99 dianggap sedang, dan skor 3.0 sampai 4.0 adalah kuat. Serupa dengannya, pada sumbu y, skor bobot EFE total 1.0–1.99 dipandang rendah, skor

2.0–2.99 dianggap sedang, dan skor 3.0–4.0 adalah tinggi.

Organisasi yang berhasil, mampu mencapai portofolio bisnis yang masuk atau berada di seputar sel I dalam Matriks IE. Berdasarkan pengolahan data total skor untuk faktor internal sebesar 3.447 dan skor untuk faktor eksternal sebesar 2.849 (Gambar 1) sehingga dimasukkan dalam kategori sel IV yang mana menurut David (2002) strategi yang digunakan adalah tumbuh dan membangun. Maka pemilihan strategi yang dilakukan adalah strategi intensif dengan melakukan upaya pengembangan dari produk/jasa yang telah dihasilkan oleh Pemkot Bogor dalam hal ini laporan keuangan serta pemilihan strategi integratif dengan membangun kerjasama dengan pihak eksternal Pemkot Bogor seperti lembaga akademik, kementerian/lembaga dan bahkan pihak masyarakat atau swasta dengan harapan dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor.

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------|------|----------|----------|
| | 4 | 3 Skor Bobot Total IFE | | 2 | 1 |
| Skor Bobot Total EFE | 3 | I | II | III | |
| | 2 | IV | V | VI | |
| | 1 | VII | VIII | IX | |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Gambar 1. Hasil matriks IE pada peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor

Perumusan Alternatif Strategi

Perumusan alternatif strategi menggunakan pendekatan matrik SWOT di mana dalam perumusan alternatif strategi menggunakan pendekatan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan tantangan. Faktor internal diletakkan dalam sumbu mendatar terdiri dari dua kolom yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal diletakkan dalam sumbu vertikal yang terdiri dari dua baris yaitu peluang dan tantangan. Masing-masing komponen akan disilang padukan dengan komponen lain dari sisi horizontal dan vertikal sehingga akan dihasilkan empat rumusan alternatif strategi yang akan diimplementasikan. Alternatif strategi itu berupa strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

1. Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*)

Strategi kekuatan-peluang menggunakan kekuatan internal Pemkot Bogor untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya kebijakan Pemda, Tupoksi, SOP dan komitmen pimpinan SKPD dalam mendukung pengelolaan keuangan dari sisi kekuatan dan dikombinasikan adanya kerjasama dengan BPKP, reward terhadap kualitas LKPD dengan opini WTP dan terdapat seleksi eselon II secara terbuka dari sisi peluang yang akan didapatkan oleh Pemkot Bogor, maka strategi yang dilakukan *leadership reinforcement*.

2. Strategi WO (*Weakness Opportunity Strategy*)

Strategi kelemahan-peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki Pemkot Bogor dengan memanfaatkan peluang eksternal untuk meningkatkan kualitas LKPD Pemkot Bogor. Rumusan strateginya:

- a. Kelemahan dari sisi pelatihan dan sosialisasi SDM, tidak adanya *transfer knowledge*, lemahnya kompetensi aparatur, ketiadaan evaluasi pasca diklat dalam mengukur indikator keberhasilan suatu diklat serta pola mutasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun kompetensi dengan dipadukan adanya peluang kerjasamanya dengan BPKP serta reward apabila dapat berhasil meningkatkan opini LKPD, maka strategi yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM.

3. Strategi ST (*Strength Threat Strategy*)

Strategi kekuatan-ancaman menggunakan kekuatan yang dimiliki Pemkot Bogor untuk menghindari atau mengurangi dampak tantangan eksternal. Maka dirumuskan strategi berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki Pemkot Bogor yaitu kebijakan Pemda, Tupoksi, SOP dan komitmen pimpinan SKPD dalam pegelolaa keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai digunakan untuk menjawab tantangan berupa adanya moratorium perekrutan SDM, masih terdapat perubahan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan dan adanya hukuman terkait keterlambatan penyusunan APBD, maka dirumuskan strategi yaitu *strengthen policy*.

4. Strategi WT (*Weakness Threat Strategy*)

Strategi kelemahan-ancaman merupakan taktik bertahan yang diarahkan untuk mengurahi kelemahan internal yang

dimiliki Pemkot Bogor dan menghindari tantangan lingkungan yang ada guna tercapainya kualitas LKPD yang baik. Strategi yang dirumuskan:

- a. Kelamahan Pemkot Bogor didominasi pada faktor kapasitas SDM, dari sisi tantangan Pemkot Bogor memiliki kendala berupa moratorium perekrutan SDM, kebijakan

penyusunan laporan keuangan yang masih berubah dan adanya hukuman terkait keterlambatan penyusunan APBD, maka strategi yang harus dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk bertahan pada kondisi yang ada saat ini berupa penerapan dan pengembangan *learning organization*.

Tabel 6. Perumusan alternatif strategi peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor

| | | |
|---|--|---|
| Internal (IFE) | <u>Kekuatan (S)</u> | <u>Kelemahan (W)</u> |
| Eksternal (EFE) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemda dalam mendukung pengelolaan keuangan sudah jelas 2. Tupoksi yang jelas bagi pengelola keuangan 3. Ketersediaan sarana pendukung penyusunan laporan keuangan yang memadai 4. SOP dalam penyusunan laporan keuangan sudah jelas 5. Komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah sangat kuat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan sosialisasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kurang memadai 2. Ketiadaan evaluasi pasca diklat pengelolaan keuangan 3. Minimnya <i>transfer knowledge</i> tentang pengelola keuangan 4. Lemahnya kompetensi aparatur pengelola keuangan 5. Ketidaksihonesty pola mutasi/promosi pejabat/pegawai pengelola keuangan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi pegawai |
| | <u>Peluang (O)</u> | <u>Strategi SO</u> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan lembaga BPKP dalam review LKPD sudah terjalin dengan baik 2. Terdapat <i>reward</i> terhadap kualitas LKPD dengan opini WTP 3. Terdapat seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan eselon II (<i>talent pool</i>) | Strategi <i>leadership reinforcement</i> (S1, S2, S4, S5, O1, O2, O3) | Strategi peningkatan kapasitas SDM (W1, W2, W3, W4, W5, O1, O2) |
| <u>Tantangan (T)</u> | <u>Strategi ST</u> | <u>Strategi WT</u> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Moratorium dalam perekrutan SDM aparatur pengelola keuangan daerah melalui seleksi ASN 2. Perubahan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan yang diterbitkan Pemerintah 3. Adanya hukuman terkait keterlambatan penyusunan APBD | Strategi <i>strengthen policy</i> (S1, S2, S3, S4, S5, T1, T2, T3) | Strategi <i>learning organization</i> (W1, W2, W3, W4, W5, T1, T2, T3) |

Sumber: Data primer (2017), diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kualitas LKPD Pemkot Bogor masuk kriteria cukup baik walaupun ada indikator yang mendapatkan kriteria kurang baik berupa keterampilan pada variabel kompetensi SDM dan dapat

dibandingkan pada variabel laporan keuangan.

2. Faktor kekuatan internal berupa tupoksi yang jelas bagi pengelola keuangan memiliki nilai bobot yang cukup tinggi sebesar 0.122 dan faktor peluang eksternal yaitu adanya seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan eselon II memiliki nilai bobot yang cukup tinggi sebesar 0.213. Strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT yaitu strategi

leadership reinforcement, strategi peningkatan kapasitas SDM, strategi *strengthen policy*, dan strategi *learning organization*.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan keterampilan pengelola keuangan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis sehingga selain mendapatkan pengetahuan juga merasakan dalam bentuk pengalaman dan melakukan pengimbasan (*transfer knowledge*) kepada rekan kerja baik secara horizontal maupun vertikal dengan harapan memiliki pengetahuan yang sama.
2. Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya sebuah laporan keuangan kepada Pimpinan SKPD, Pejabat dan pegawai pengelola keuangan di setiap masing-masing unit.
3. Memasukkan target peningkatan kualitas LKPD pada RPJMD berupa peningkatan penilaian opini menjadi WTP dari BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah. 2012. *Optimalisasi tata kelola keuangan daerah*. Tangerang, 2012 Jun 11. Direktorat Anggaran Daerah, Kemendagri.
- [BPK] Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. Jakarta (ID): BPK.
- [BPS Kota Bogor] Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2016. *Kota Bogor Dalam Angka 2016*. Bogor (ID): BPS Kota Bogor.
- David FR. 2002. *Manajemen Strategis: Konsep*. Versi Bahasa Indonesia. Edisi ketujuh. Jakarta (ID): PT. Prenhallindo.
- David FR. 2011. *Strategic Management: Concepts and Cases*. 13th Ed. New Jersey (AS): Prentice Hall.
- David FR, David FR. 2016. *Manajemen Strategik: Suatu pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep*. Edisi 15. Jakarta (ID): Salemba Empat.
- Djaali. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta (ID): CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Nugraha DS. 2010. The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Eksposisi Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*. 2(2):258-278.
- Nugraha HA, Astuti YW. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1):25-33.
- Rangkuti F. 2014. *Teknik Membedah Kasus Bisnis: Analisis SWOT*. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung (ID): Alfabeta Bandung.

STRATEGI OPTIMASI PROMOSI DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI SWASTA DI KABUPATEN BOGOR

Nina Widyani¹, A Faroby Falatehan, Himawan Hariyoga³

¹Mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

²Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Departemen Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACT

The increasing competition among regions underscores the importance of promotion in boosting private investment. The expansive and scattered nature of Bogor Regency necessitates the use of appropriate means to introduce the regency. The research objective of this thesis is to develop promotion development strategies to enhance private investment in Bogor Regency. The method employed in this research is the Analytic Network Process (ANP). The results of the ANP method indicate that the alternative strategy with the highest priority is the focused and directed management of promotion programs, with a value of 0.549. The second priority is the strategy of developing promotional products according to investment potential, with a value of 0.324, and the strategy of improving the quality of human resources in marketing communication is the next priority with a value of 0.128.

Keywords: Analytic Network Process, Private Investment, Promotion, Strategy

ABSTRAK

Persaingan antar daerah yang semakin tinggi menyebabkan pentingnya promosi dalam meningkatkan investasi swasta. Wilayah Kabupaten Bogor yang tersebar luas mengakibatkan perlunya sarana yang tepat dalam memperkenalkan Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian dari penulisan tesis ini yaitu membangun strategi pengembangan promosi agar dapat meningkatkan investasi swasta di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Analytic Network Process* (ANP). Hasil metode ANP menunjukkan bahwa alternatif strategi yang menjadi prioritas pertama yaitu pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah dengan nilai 0,549, prioritas kedua yaitu strategi pengembangan produk promosi sesuai potensi investasi dengan nilai 0,324, dan strategi peningkatan kualitas SDM dalam marketing komunikasi merupakan strategi dengan prioritas berikutnya dengan nilai 0,128.

Kata Kunci: *Analytic Network Process, Investasi Swasta, Promosi, Strategi*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga terbesar di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, tentunya memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan ditahun 2016 menjadi 5,67%, setelah sebelumnya terus mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 hingga 5,04%. Daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat dalam periode tahun 2013 hingga 2016 yaitu Kota Bandung, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,79% bahkan mencapai 8,87% di tahun 2013. Begitupun dalam PDRB perkapita Kota Bandung menduduki peringkat tertinggi, kemudian

Kabupaten Karawang peringkat kedua dan Kabupaten Bekasi diperingkat tiga. Akan tetapi untuk daerah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi di Jawa Barat ditempati Kabupaten Bekasi, lalu Kota Bandung dan Kabupaten Bogor di peringkat kedua dan ketiga.

Dalam hal PDRB perkapita, Kabupaten Bogor menduduki posisi kesembilan dengan nilai Rp 33,05 juta per tahun, masih lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp 34,88 juta pertahun. Hal ini

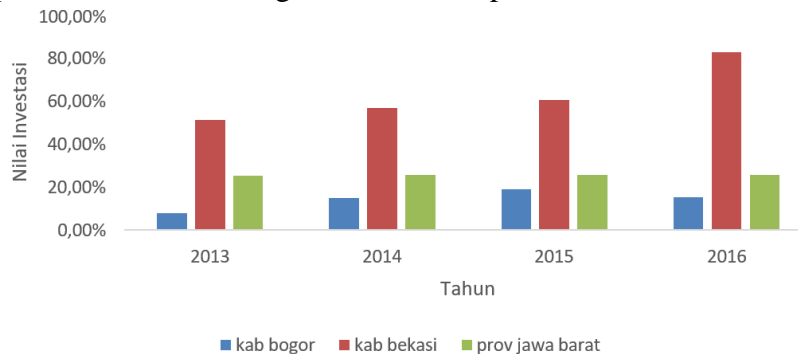
diakibatkan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebesar 5,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan PDRB yang telah diraih harus didistribusikan kepada seluruh penduduk



sehingga PDRB per kapita Kabupaten Bogor hanya meraih peringkat kesembilan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam kisaran tahun 2013 hingga 2016, realisasi investasi

swasta PMA dan PMDN Kabupaten Bekasi mencapai Rp 130,99 triliun dengan



Sumber: Diolah dari data BPKM (2017), BPS Kabupaten Bogor (2013-2016), dan BPS Kabupaten Bekasi (2016)

Gambar 1. Perbandingan persentase nilai investasi PMA dan PMDN terhadap PMTB di Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi

Gambar 1 memperlihatkan presentase nilai investasi PMA dan PMDN terhadap PMTB di Kabupaten Bekasi jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat dan terus meningkat hingga mencapai 82,66% di tahun 2016. Berbeda dengan Kabupaten Bogor yang mengalami penurunan presentase nilai investasi PMA dan PMDN terhadap PMTB hingga mencapai 15,25% ditahun 2016, setelah sebelumnya mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 19,07%.

Dalam rangka meningkatkan investasi, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya, baik dalam hal perbaikan iklim investasi melalui kebijakan daerah yang mendukung investasi, tersedianya berbagai sektor potensi investasi, serta dengan perbaikan pelayanan perizinan dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap perizinan yang semakin tinggi di tahun 2017 hingga mencapai 76,11%, perizinan yang tersertifikasi ISO berjumlah 77 perizinan, serta telah diterapkannya sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (OSS) oleh Kementerian Perekonomian, promosi pun berkontribusi sangat penting dalam peningkatan investasi. Promosi merupakan salah satu sarana untuk menjaga persepsi positif para calon investor dalam mengembangkan daya tarik berinvestasi ditengah persaingan antar daerah yang

rata-rata kontribusi terhadap PMTB sebesar 62,89%, jauh berbeda dengan nilai investasi swasta PMA dan PMDN Kabupaten Bogor yaitu Rp 24,46 triliun dengan rata-rata kontribusi terhadap PMTB hanya sebesar 14,19%, bahkan dapat melampaui nilai rata-rata kontribusi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat yang sebesar 25,64%. Hal ini dapat terlihat dalam Gambar 1.

semakin meningkat. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian mengenai strategi pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan investasi swasta di Kabupaten Bogor.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bogor, pada bulan Juni- Oktober 2018. Batas waktu kajian yaitu data tahun 2013 sampai dengan 2017.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Rianse dan Abdi (2009), data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, serta data dan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor,

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara itu, pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner. Dalam rangka menambah informasi dilakukan pula wawancara tidak terstruktur pada responden yang sama yaitu ahli yang terlibat langsung dengan promosi investasi di Kabupaten Bogor.

Metode Analisis Data

Metode *Analytic Network Process* (ANP) merupakan gabungan dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari hierarki kontrol atau jaringan dari kriteria dan subkriteria yang mengontrol interaksi, sedangkan bagian kedua adalah jaringan pengaruh-pengaruh diantara elemen dan cluster. AHP dan ANP sama-sama menggunakan skala rasio. Konsep utama dalam ANP adalah *influence* (pengaruh), sementara konsep utama dalam AHP adalah *preference* (preferensi). Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif; di mana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam ANP disebut *cluster* yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul (*node*). Adanya *feedback* di dalam ANP, alternatif-alternatif tersebut selain dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki, dapat juga bergantung/terikat pada sesama alternatif.

Responden yang diperlukan dalam metode *Analytic Network Process* (ANP) terdiri dari:

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
2. Kepala Seksi Promosi
3. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
4. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Realisasi investasi swasta di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013-2017

| Tahun | PMA | | PMDN | |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (US\$.Ribu) | Jumlah Proyek | Nilai Investasi(Rp. Juta) |
| 2013 | 1542 | 7.124.880,7 | 232 | 9.006.138,2 |
| 2014 | 1671 | 6.561.946,4 | 258 | 18.726.925,0 |
| 2015 | 4497 | 5.738.714,3 | 935 | 26.272.867,8 |
| 2016 | 3870 | 5.470.856,7 | 822 | 30.360.210,7 |
| 2017 | 4722 | 5.142.949,3 | 1132 | 38.390.639,3 |

Sumber: BKPM (2018)

Perkembangan Investasi Swasta di Kabupaten Bogor

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam beberapa tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, begitupun dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), akan tetapi tidak begitu halnya dengan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai salah satu komponen dalam PMTB.

Apabila melihat perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Tabel 1, nilai PMA selama periode tahun 2013-2017 di Jawa Barat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari US\$ 7,12 miliar ditahun 2013 hingga US\$ 5,14 miliar ditahun 2017. Dilihat dari jumlah proyek yang terlaksana, jumlah proyek mengalami fluktuasi, yaitu mengalami kenaikan signifikan ditahun 2015 menjadi 4.497 proyek, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2016, yang kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2017 sebesar 852 menjadi 4.722 proyek. Akan tetapi nilai realisasi investasi PMDN di Jawa Barat selama tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan dari Rp 9 triliun ditahun 2013 hingga Rp 38,39 triliun di tahun 2017. Dilihat dari besarnya jumlah proyek yang terlaksana dari kisaran tahun 2013-2017, terlihat keadaan yang fluktuatif, yaitu mengalami peningkatan hingga melonjak tinggi ditahun 2015 menjadi 935 proyek, walaupun mengalami penurunan ditahun 2016, tapi kemudian dapat meningkat kembali ditahun 2017 menjadi 1.132 proyek.

Berdasarkan data perkembangan realisasi PMDN berdasarkan lokasi di Jawa Barat yang dikeluarkan BKPM, realisasi investasi swasta di Kabupaten Bogor sendiri, selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Dalam PMA turun naik nilai investasi sangat terlihat, yaitu mengalami kenaikan dari US\$ 151,90 juta ditahun 2013 menjadi US\$ 320,30 juta ditahun 2014, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi US\$ 165,46 juta, mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi US\$ 373,17 juta, tapi kemudian menurun kembali di tahun 2017 menjadi US\$ 318,95 juta. Walaupun sempat mengalami penurunan nilai investasi dan peringkat di Tabel 2. Realisasi PMA di Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2017

tahun 2015, tapi apabila dilihat dari jumlah proyek yang dilaksanakan, pada tahun 2015 justru mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 151 proyek ditahun 2014 menjadi 410 proyek di tahun 2015. Jumlah proyek terbesar terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 484 proyek dengan kontribusi 6,2% terhadap realisasi investasi di Jawa Barat. Peringkat tertinggi terdapat di tahun 2016, yaitu menjadi peringkat ketiga di provinsi Jawa Barat dengan 484 proyek dan berkontribusi sebesar 6,8% terhadap realisasi investasi swasta di Jawa Barat, yang juga merupakan kontribusi terbesar untuk PMA dalam periode tahun 2013-2017 (Tabel 2).

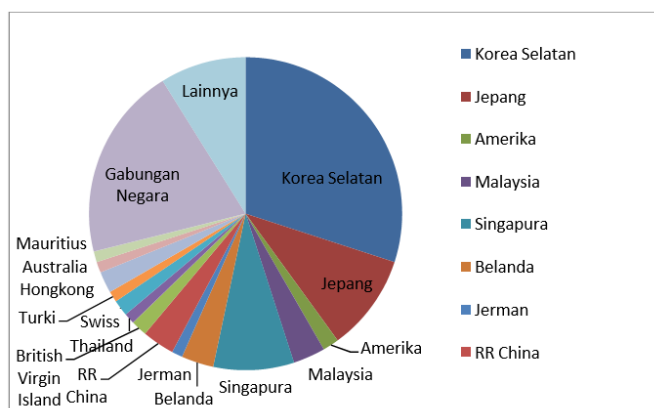
| Tahun | Jumlah proyek | Nilai investasi(US\$ Ribu) | Peringkat di Jawa Barat | Kontribusi terhadap Provinsi Jawa Barat |
|-------|---------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 2013 | 138 | 151.899,7 | 4 | 2,1% |
| 2014 | 151 | 320.293,8 | 6 | 4,9% |
| 2015 | 410 | 165.469,0 | 7 | 2,9% |
| 2016 | 367 | 373.136,9 | 3 | 6,8% |
| 2017 | 484 | 318.954,1 | 4 | 6,2% |

Sumber: BKPM (2018), diolah

Menurut data rekapitulasi realisasi investasi berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan DPMPTSP Kabupaten Bogor, nilai realisasi PMA di Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2017 terbesar berada di sektor industri makanan, hal ini dikarenakan adanya penanaman modal dari perusahaan asal negara Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang usaha ransum makanan hewan di Kecamatan Citeureup pada tahun 2016 dengan nilai yang sangat besar dan mendominasi nilai

investasi untuk PMA. Selanjutnya sektor usaha dengan nilai terbesar kedua dan ketiga yaitu industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi serta industri karet, barang dari karet, dan plastik.

Berdasarkan kuantitas dari jumlah proyek yang dilakukan, negara asing dengan jumlah proyek terbanyak di Kabupaten Bogor adalah negara Korea Selatan, yang terlihat pada Gambar 2.



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bogor (2017)

Gambar 2. Investor PMA berdasarkan negara di Kabupaten Bogor tahun 2013-2017

Negara Korea Selatan merupakan negara asing dengan realisasi jumlah proyek terbanyak di Kabupaten Bogor yaitu sekitar 30%, sedangkan negara asing dengan nilai

investasi terbesar adalah negara Amerika Serikat. Selanjutnya realisasi jumlah proyek terbanyak kedua merupakan gabungan negara

sebesar 20%, lalu negara Jepang di posisi ketiga dengan 10%.

Berdasarkan data perkembangan realisasi PMDN berdasarkan lokasi di Jawa Barat yang dikeluarkan BKPM, realisasi investasi di Kabupaten Bogor periode tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu Rp 5,80 triliun menjadi Rp 6,83 triliun di tahun 2015, namun

Tabel 3. Realisasi PMDN di Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2017

| Tahun | Jumlah proyek | Nilai investasi(Rp Juta) | Peringkat di Jawa Barat | Kontribusi Terhadap Provinsi Jawa Barat |
|-------|---------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 2013 | 43 | 1.030.416,1 | 4 | 11,4% |
| 2014 | 55 | 1.754.293,3 | 5 | 9,4% |
| 2015 | 146 | 6.828.371,2 | 1 | 26% |
| 2016 | 124 | 2.706.514,6 | 4 | 8,9% |
| 2017 | 194 | 2.137.296,2 | 5 | 5,6% |

Sumber: BKPM (2018), diolah

Menurut data rekapitulasi izin usaha yang dikeluarkan DPMPSTP Kabupaten Bogor tahun 2013-2017, sektor usaha yang dominan dalam realisasi PMDN di Kabupaten Bogor yaitu sektor industri mineral non logam dengan nilai investasi terbesar dikarenakan adanya investasi yang cukup besar dibidang usaha industri semen ditahun 2016. Sektor selanjutnya dengan nilai terbesar kedua dan ketiga yaitu industri makanan serta industri alat angkutan dan transportasi lainnya dengan investasi yang cukup besar ditahun 2015.

Apabila dilakukan perbandingan antara nilai realisasi investasi terhadap rencana investasi, pada data rekapitulasi yang dikeluarkan BKPM, dapat dilihat presentase realisasi investasi periode tahun 2013-2017

Tabel 4. Perbandingan nilai realisasi investasi terhadap rencana investasi tahun 2013-2017

| Tahun | Nilai PMA (dalam US\$ Ribu) | | | PMDN (dalam Rp Juta) | | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|
| | Rencana | Realisasi | Perbandingan | Rencana | Realisasi | Perbandingan |
| 2013 | 341.123,30 | 151.899,70 | 44,53% | 2.458.584,60 | 1.030.416,10 | 41,91% |
| 2014 | 612.151,70 | 320.293,80 | 52,32% | 7.426.144,10 | 1.754.293,30 | 23,62% |
| 2015 | 349.807 | 165.469 | 47,30% | 10.596.667,40 | 6.828.371,20 | 64,44% |
| 2016 | 4.149.656,30 | 373.136,90 | 8,99% | 13.433.803,10 | 2.706.514,60 | 20,15% |
| 2017 | 954.808,50 | 318.954,10 | 33,41% | 32.767.002,10 | 2.137.296,20 | 6,52% |
| Total | 6.407.546,80 | 1.329.753,50 | 20,75% | 66.682.201,30 | 14.456.891,40 | 21,68% |

Sumber: BKPM (2018)

Kegiatan Promosi Investasi Swasta di Kabupaten Bogor

Dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor, maka Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), yang sebelumnya

kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 2,14 triliun di tahun 2017. Peringkat investasi swasta untuk PMDN tertinggi di Jawa Barat diduduki Kabupaten Bogor pada tahun 2015, dimana Kabupaten Bogor berkontribusi sebesar 26% terhadap investasi Jawa Barat dan terdapat peningkatan jumlah proyek dari 55 proyek menjadi 146 proyek (Tabel 3).

cenderung masih kurang, yaitu sebesar 20,75% untuk PMA dan 21,68% untuk PMDN. Realisasi PMA dengan presentase lebih dari 50% terdapat pada tahun 2014, yaitu mencapai 52,32%, sedangkan realisasi PMDN dengan presentase lebih dari 50% terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 64,44%. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan presentase realisasi investasi pada tahun lainnya, sebagian besar presentase realisasi investasi cenderung kurang dari 50%, bahkan mencapai angka 8,99% untuk PMA ditahun 2016 dan 6,52% untuk PMDN ditahun 2017, seperti yang terlihat pada Tabel 4. Dengan demikian terdapat hal lain selain promosi investasi yang juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan investasi swasta di Kabupaten Bogor.

bernama Badan Perizinan Terpadu (BPT) dan kemudian menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTP) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun

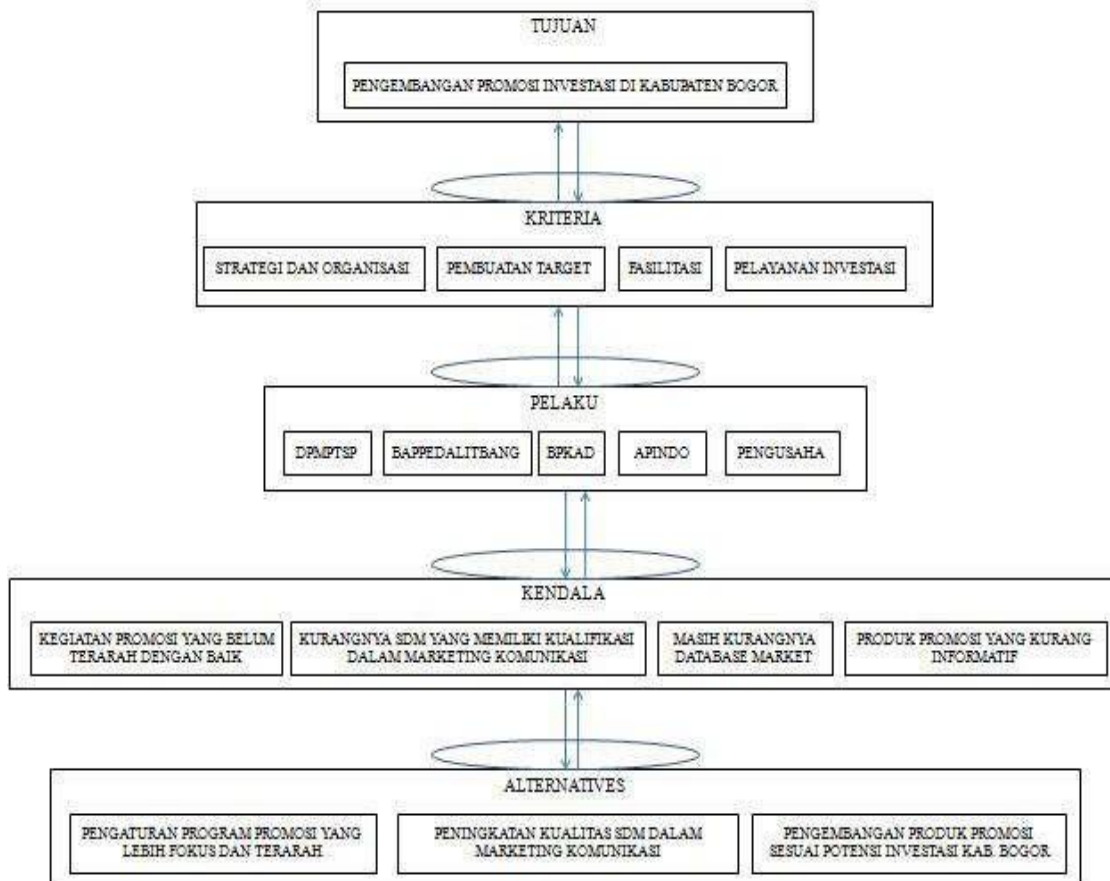
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berbeda dengan BPMPTSP yang berbentuk badan sebagai koordinator administrasi, DPMPTSP yang telah berbentuk dinas dapat melaksanakan tugasnya secara teknis dan mempunyai wewenang yang lebih besar dalam mengambil suatu keputusan.

Kegiatan promosi investasi swasta di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh seksi promosi pada Bidang Pengembangan dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan promosi penanaman modal.

Perumusan Alternatif Strategi

Hasil diskusi dengan beberapa narasumber dalam bidang promosi investasi dengan menggunakan beberapa faktor terkait promosi investasi yang terdapat dalam kajian Loewendahl (2001), maka ditetapkan 5 (lima) cluster yang mempengaruhi promosi investasi swasta di Kabupaten Bogor yaitu *cluster* tujuan, *cluster* kriteria, *cluster* pelaku, *cluster* kendala, dan *cluster* alternatives. Kemudian dengan menggunakan aplikasi *superdecisions* didapat hasil seperti terlihat pada Gambar 3.



Sumber: Data primer (2019), diolah

Gambar 3. ANP strategi pengembangan promosi investasi di Kabupaten Bogor
Tabel 5. Urutan prioritas faktor yang mempengaruhi promosi investasi

| Cluster | Name (Node) | Nilai |
|----------|---|-------|
| Tujuan | Pengembangan promosi investasi di Kabupaten Bogor | 0,444 |
| Kriteria | Pembuatan target | 0,454 |
| | Strategi dan organisasi | 0,351 |
| | Pelayanan investasi | 0,113 |
| | Fasilitas | 0,082 |
| Pelaku | DPMPTSP | 0,256 |

| | | |
|------------|--|-------|
| | Bappedalitbang | 0,129 |
| | BPKAD | 0,077 |
| | Pengusaha | 0,058 |
| | APINDO | 0,037 |
| Kendala | Kegiatan promosi yang belum terarah dengan baik | 0,489 |
| | Produk promosi yang kurang informatif | 0,306 |
| | Masih kurangnya database market | 0,106 |
| | Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam marketing komunikasi | 0,099 |
| Alternatif | Pengaturan program promosi yang lebih focus dan terarah | 0,549 |
| | Pengembangan produk promosi sesuai potensi investasi Kabupaten Bogor | 0,324 |
| | Peningkatan kualitas SDM dalam marketing komunikasi | 0,128 |

Sumber: Data primer (2019), diolah

Kriteria

Berdasarkan kajian Loewendahl (2001), terdapat 4 (empat) faktor dalam promosi investasi, yaitu:

1. Strategi dan organisasi
2. Pembuatan target
3. Fasilitas
4. Pelayanan investasi

Hasil olahan data yang terdapat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa faktor yang mempunyai tingkat kepentingan terbesar dan mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Bogor adalah Pembuatan Target dengan nilai 0,454. Sedangkan 3 (tiga) faktor lainnya, yaitu strategi diperingkat kedua dengan nilai 0,351, pelayanan investasi peringkat ketiga dengan nilai 0,113, dan fasilitasi diperingkat terakhir dengan nilai 0,082.

Dari hasil wawancara menunjukkan bukan berarti 3 (tiga) faktor lainnya, yaitu strategi dan organisasi, fasilitasi, serta pelayanan investasi tidak mempunyai pengaruh, namun sampai saat ini struktur dan organisasi dalam penanaman modal itu sendiri telah mengalami peningkatan, yaitu dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang sebelumnya berbentuk badan, yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), setelah sebelumnya bernama Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang tentunya mempunyai kewenangan yang lebih sempit daripada Dinas. Berbeda dengan BPMPTSP yang berbentuk badan sebagai koordinator administrasi, DPMPTSP yang telah berbentuk dinas dapat melaksanakan tugasnya secara teknis dan

mempunyai wewenang yang lebih besar dalam mengambil suatu Keputusan.

Pelaku

Berdasarkan Tabel 5, pelaku (aktor) utama yang mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Bogor adalah DPMPTSP. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Didalam susunan organisasinya terdapat Seksi Promosi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan promosi penanaman modal, sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kendala

Berdasarkan hasil olahan data, pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang belum terarah dengan baik merupakan kendala terbesar yang mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Bogor, seperti yang terlihat pada laporan monitoring yang dilakukan Subag Program dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Bogor, dimana kegiatan eksibisi investasi yang diikuti terselenggara di pusat perbelanjaan yang belum ramai pengunjung, sehingga kegiatan promosi yang diikuti belum terarah pada target yang menjadi sasaran yaitu Pengusaha, hal ini dikarenakan kurangnya pengunjung, selain itu pengunjung sebuah pusat perbelanjaan pada umumnya adalah masyarakat yang ingin dan sedang berbelanja, sehingga pemilihan kegiatan eksibisi investasi yang akan diikuti

ataupun kegiatan promosi lainnya dipandang sangat penting agar dapat menysasar target yang tepat dan potensial.

Alternatives

Berdasarkan pengolahan data superdecisions Analytical Network Process (ANP) terlihat bahwa alternatives strategi yang mempunyai nilai paling besar dalam pengembangan promosi investasi di Kabupaten Bogor adalah pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah dengan nilai 0,549, prioritas kedua yaitu strategi pengembangan produk promosi sesuai potensi investasi dengan nilai 0,324, dan strategi peningkatan kualitas SDM dalam marketing komunikasi merupakan strategi dengan prioritas berikutnya dengan nilai 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah dipercaya mampu mengembangkan promosi investasi di Kabupaten Bogor.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan perumusan alternatif strategi melalui *Analytical Network Process* (ANP), maka strategi pertama yang harus dilakukan adalah pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah. Pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah dalam arti program promosi investasi harus sesuai dengan visi, misi, arahan kebijakan dan sasaran penanaman modal. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi.

Berdasarkan laporan tahunan seksi promosi di tahun 2017, kegiatan eksibisi dilakukan dengan delapan kali kegiatan dengan anggaran Rp1.019.703.000,-. Selain itu, pada laporan tahunan seksi promosi di tahun 2017, terdapat kegiatan promosi melalui media elektronik yang dilaksanakan berupa publikasi di Metro TV selama 3 (tiga) hari di jam 06.00 – 06.30 dan publikasi di portal pojoksatu.id dengan anggaran Rp333.000.000,-. Kegiatan ini dilakukan berulang dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tanpa dilakukan evaluasi efektivitas dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan kegiatan promosi investasi sebaiknya lebih fokus pada sektor yang menjadi prioritas.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam strategi pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah yaitu pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih fokus pada sektor yang menjadi prioritas, seperti halnya sektor yang menjadi prioritas dalam promosi penanaman modal saat ini yaitu sektor pariwisata. Belum adanya database market termasuk database market untuk sektor pariwisata dan materi promosi investasi sektor pariwisata yang kurang informatif menyebabkan kegiatan promosi investasi dinilai kurang fokus pada sektor prioritas.

3. Penyusunan materi promosi yang informatif dan menarik.

Dalam promosi investasi, materi promosi memegang peranan yang sangat penting. Materi yang dibuat harus berdasarkan pada keinginan target pasar/market, yaitu calon investor, seperti berisikan informasi mengenai sektor potensi investasi yang tersedia, luas lahan, adanya kawasan khusus dengan kepastian status lahan, kemudahan investasi, adanya insentif yang menarik, kemudahan dalam proses perizinan, penghargaan yang pernah diraih DPMPTSP Kabupaten Bogor dalam bidang investasi, ketersediaan infrastruktur, bahkan masterplan kawasan potensi investasi beserta rencana pengembangan dan estimasi nilai investasi yang diperlukan. Sebaiknya materi promosi juga lebih banyak berisikan sektor yang menjadi prioritas, misalnya sektor yang menjadi prioritas saat ini yaitu sektor pariwisata.

4. Adanya koordinasi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun dengan bidang lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor yang berhubungan dalam pengembangan program promosi investasi.

Pengembangan program promosi investasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh seksi promosi, dikarenakan dalam mengembangkan promosi diperlukan beberapa aspek yang berkaitan dengan tupoksi seksi lain di Bidang Pengembangan dan Promosi ataupun sub bagian dan seksi dibidang lainnya. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun bidang lain yang berkaitan, agar

pengembangan program promosi dapat lebih optimal.

5. Adanya monitoring dan evaluasi secara kendala untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi investasi.

Monitoring dan evaluasi sangatlah penting dalam suatu kegiatan promosi, karena dengan adanya monitoring dan evaluasi dapat diketahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi dalam menjangkau targetnya, apakah konten/kegiatan promosi tersebut sudah menarik, serta mengetahui apakah kegiatan promosi tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi kedua yaitu pengembangan produk promosi sesuai potensi investasi Kabupaten Bogor. Terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya kegiatan promosi lain yang dipandang lebih efektif dan efisien, yaitu pengoptimalan kegiatan promosi dengan media online. Wilayah Kabupaten Bogor yang tersebar luas dan terpisah oleh berbagai batasan fisik menyebabkan banyaknya orang belum mengenal berbagai daerah yang terdapat di Kabupaten Bogor.

Pendistribusian konten promosi yang merupakan tahapan promosi investasi merupakan hal yang penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pemilihan tempat distribusi konten yang sesuai dengan target promosi. Selanjutnyaterdapat beberapa hal penting lainnya, yaitu: *branding*, penentuan waktu promosi dan kontinuitas kegiatan promosi. Terdapat beberapa jenis media *online* yang dapat digunakan sebagai saluran distribusi konten promosi investasi, diantaranya: *website*, email marketing, google adwords, yahoo bing, blog ataupun berbagai media sosial seperti google+, facebook, twitter, linkedIn, youtube, dan instagram.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil kajian metode *Analytical Network Process* (ANP), menunjukkan bahwa faktor yang mempunyai tingkat kepentingan terbesar dan mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Bogor adalah Pembuatan Target dengan nilai 0,453. Dalam cluster pelaku, pelaku (aktor) utama yang mempengaruhi

promosi investasi di Kabupaten Bogor adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 0,256. Selanjutnya dalam *cluster* kendala, kegiatan Promosi yang Belum Terarah dengan baik merupakan kendala terbesar yang mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Bogor dengan nilai 0,489. Alternatif strategi yang menjadi prioritas pertama yaitu pengaturan program promosi yang lebih fokus dan terarah dengan nilai 0,549, prioritas kedua yaitu strategi pengembangan produk promosi sesuai potensi investasi dengan nilai 0,324, dan strategi peningkatan kualitas SDM dalam marketing komunikasi merupakan strategi dengan prioritas berikutnya dengan nilai 0,128.

Saran

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya : (1) Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi, (2) Pengaturan kegiatan promosi sebaiknya lebih fokus pada sektor yang menjadi prioritas, (3) Penyusunan materi promosi yang informatif dan menarik, (4) Adanya koordinasi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun dengan bidang lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor yang berhubungan dalam pengembangan program promosi investasi, (5) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi investasi, dan (6) Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media online.

DAFTAR PUSTAKA

- [Bappedalitbang, BPS] Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2017. Buku Saku Indikator Ekonomi Daerah. Bogor (ID) : Bappedalitbang.
- [BKPM] Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2018. Rekapitulasi Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bogor.
- [BPMPTSP] Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang. 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2016. [Internet]. [diunduh 2018 Okt 15]. Tersedia pada : [http://ppid.karawangkab.go.id/sites/default/files/informasi_berkala/DPMPTSP LAKIP202016%20Gabungan.pdf](http://ppid.karawangkab.go.id/sites/default/files/informasi_berkala/DPMPTSP%20LAKIP202016%20Gabungan.pdf).
- [BPMPTSP] Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. 2016. Profil Investasi Kabupaten Bogor. Bogor (ID) : BPMPTSP.
- [DPMPTSP] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. 2017. Rekapitulasi SPIPISE Izin Prinsip PMA dan PMDN. Bogor(ID): DPMPTSP.
- Hasan, Ali. 2013. Marketing. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Media Pressdindo.
- Marantika, George Iwan. 2008. Strategi Promosi Investasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Universitas Kristen Immanuel (UKRIM).
- Rahdiana, Dodi. 2011. Strategi Peningkatan Investasi Swasta di Kabupaten Bogor. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Rianse dan Abdi. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi. Bandung. CV. Alfabeta.

OPTIMASI KINERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN AEK NAULI DI SUMATERA UTARA

Hendry Elvin Simamora¹, Manuntun Parulian Hutagaol², Irdika Mansur³

¹Mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB

ABSTRACT

The Aek Nauli Environment and Forestry Research and Development Center (BP2LHK Aek Nauli) has a relatively high budget absorption rate, averaging 96.96% from 2012 to 2016. However, this high budget absorption rate does not necessarily imply that the performance and budget management at BP2LHK Aek Nauli are perfect. Issues such as expenditure accumulation at the end of the year and discrepancies between planned and actual budget absorption on a monthly basis still persist. This study aims to recommend performance improvement strategies for the Aek Nauli Environmental and Forestry Research and Development Center using the SWOT method. The research results identified 10 strategies to enhance performance at BP2LHK Aek Nauli, including (1) Improving commitment to adhere to previously created documents, (2) Enhancing communication for rapid information dissemination related to the latest regulations, (3) Increasing routine evaluation and internal supervision to enhance compliance with regulations, (4) Allocating Non-Tax Revenue Budget (PNBP) to programs linked to seasonal variations, (5) Creating alternative budget arrangements, (6) Improving the quality of human resources to understand performance measurement processes, (7) Enhancing communication among employees regarding service, performance, and performance measurement, (8) Formulating activities aligned with the vision and mission, resulting in excellent public service, (9) Improving cooperation for utilizing research results with local stakeholders, and (10) Enhancing the dissemination of research findings.

Keywords: BP2LHK, Budget Absorption, Strategy, SWOT

ABSTRAK

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BP2LHK Aek Nauli) memiliki serapan anggaran yang cukup tinggi pada tahun 2012-2016 rata-rata 96,96%. Penyerapan anggaran yang tinggi tidak berarti kinerja maupun pengelolaan anggaran di BP2LHK Aek Nauli telah sempurna, masih terjadi penumpukan pengeluaran di akhir tahun, dan adanya ketidaksesuaian rencana dan implementasi dimana penyerapan anggaran perbulan dengan realisasi penyerapan anggaran perbulan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merekomendasikan strategi peningkatan kinerja di Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli dengan menggunakan analisis IFE, EFE, SWOT, dan QSPM. Hasil penelitian diperoleh 10 strategi dalam peningkatan kinerja di BP2LHK Aek Nauli yaitu (1) Meningkatkan komitmen mempedomani dokumen yang dibuat sebelumnya (2) Meningkatkan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru (3) Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan (4) Mengalokasikan anggaran PNBP pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim (5) Membuat susunan anggaran alternatif (6) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja (7) Meningkatkan komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja (8) Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik (9) Meningkatkan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders lokal (10) Meningkatkan diseminasi hasil penelitian.

Kata Kunci: BP2LHK, Penyerapan Anggaran, Strategi, SWOT

PENDAHULUAN

Sistem penganggaran di Indonesia semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik dengan diterbitkannya UU No.17 Tahun 2003 menuntut agar sistem penganggaran tradisional atau sering dikenal

dengan *line item budgeting* menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja atau *performance budgeting*. *Performance budgeting* adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output, visi dan misi, serta Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi

yang dituangkan dalam program-program baik dalam jangka panjang, menengah maupun dalam jangka pendek sesuai dengan yang ditetapkan (Bastian 2010).

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli merupakan salah satu Institusi Pemerintah yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Badan Penelitian

Tabel 1. Persentasi capaian penyerapan anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|----------------|----------------|-------|
| 2012 | 9.349.484.000 | 9.091.682.572 | 97,24 |
| 2013 | 9.845.037.000 | 9.516.633.068 | 96,66 |
| 2014 | 7.478.916.000 | 7.211.849.106 | 96,43 |
| 2015 | 13.171.546.000 | 12.796.355.293 | 97,15 |
| 2016 | 11.178.793.000 | 10.881.826.890 | 97,34 |

Sumber: Lakip BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016

Tabel 1 memperlihatkan dalam kurun waktu 2012-2016 capaian penyerapan anggaran BP2LHK Aek Nauli menurut Permenkeu nomor 158/PMK.02/2014 tentang tata cara pemberian penghargaan dan peneanaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/Lembaga memiliki capaian kinerja yang baik (96,96) karena melebihi standar penyerapan anggaran minimal yang digunakan yakni penyerapan anggaran minimal 95%. Penyerapan anggaran di akhir tahun tinggi masih terjadi adanya ketidaksesuaian rencana dan implementasi dimana penyerapan anggaran perbulan dengan realisasi penyerapan anggaran perbulan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif strategi dalam peningkatan kinerja yang lebih baik di BP2LHK Aek Nauli.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BP2LHK Aek Nauli) yang berada di Jalan Raya Parapat Km.10,5 Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pada bulan Januari sampai dengan Mei

Pengembangan dan Inovasi yang berkedudukan di Sumatera Utara. BP2LHK Aek Nauli memiliki anggaran yang meningkat setiap tahun, kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar 24,03% dan tahun 2016 mengalami penurunan 15,13% dari tahun 2015. Perkembangan pagu anggaran dan persentasi penyerapan anggaran BP2LHK Aek Nauli (Tabel 1).

2017. BP2LHK Aek Nauli merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder pada BP2LHK Aek Nauli. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam alokasi anggaran dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari Laporan Akuntabilitas BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016, Laporan Tahunan BP2LHK Aek Nuli tahun 2012-2016, Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) BP2LHK Aek Nauli tahun anggaran 2012-2015, Petunjuk Operasional Kerja (POK) BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016, Rencana Strategis (Renstra) BP2LHK Aek Nauli, dan Rencana Kerja (Renja) BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016.

Metode Analisis Data

Analisis SWOT

Langkah pertama diawali dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi faktor internal dan eksternal yang dianggap sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja BP2LHK Aek Nauli. Identifikasi ini

dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, kajian literatur, dan melakukan survei pendahuluan di lingkungan kerja BP2LHK Aek Nauli. Selanjutnya disusun sebuah kuesioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari informan terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan. Setelah kuisisioner selesai disusun, maka tahap berikutnya adalah penentuan informan yang akan mengisi kuisisioner tersebut. Penentuan responden/informan dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dilakukan pendekatan analisis SWOT dengan interaksi matrik IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*).

Internal Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal dalam peningkatan kinerja BP2LHK Aek Nauli berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Sementara itu *External Factor Evaluation* (EFE) dilakukan untuk mengevaluasi berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali BP2LHK Aek Nauli dalam hal peningkatan kinerja BP2LHK Aek Nauli. Hasil analisis eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada serta seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini.

Analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM)

Langkah selanjutnya adalah memilih alternatif strategi kebijakan yang harus diprioritaskan dengan menggunakan pendekatan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Hasil analisis QSPM akan menghasilkan daftar prioritas. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah diketahui dan ditentukan beberapa alternatif strategi dalam matrik SWOT, maka perlu dilakukan pemilihan prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Alternatif strategi yang dihasilkan dalam matrik SWOT membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan tidak semuanya dapat diakomodir oleh BP2LHK Aek Nauli, sehingga perlu disusun daftar prioritas strategi menggunakan analisis QSPM.

Penentuan prioritas strategi terbaik dilakukan dengan cara menentukan rating atau tingkat ketertarikan relatif dari strategi-strategi yang telah dipilih. Analisis QSPM dilakukan dengan cara memberikan nilai kemenarikan relatif (*Attractive Score* = AS) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan relatif (*Total Attractive Score* = TAS) yang tertinggi adalah merupakan prioritas strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi BP2LHK

BP2LHK Aek Nauli mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP2LHK Aek Nauli juga menyelenggarakan fungsi (a) penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim, (b) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim, (c) pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan lingkup BP2LHK Aek Nauli, (d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim, (e) pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian yang menjadi tanggung jawab BP2LHK Aek Nauli, (f) pelayanan data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi hasil-hasil penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi,

penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim, dan (g) urusan tata usaha dan rumah tangga BP2LHK Aek Nauli.

Anggaran BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016

BP2LHK Aek Nauli memiliki pagu anggaran yang berfluktuasi dari tahun 2012

Tabel 2. Anggaran belanja berdasarkan jenis belanja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli tahun 2012-2016

| Tahun | Penelitian | Non Penelitian | Belanja Modal | Total |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2012 | 2.177.025.000 | 6.943.209.000 | 229.250.000 | 9.349.484.000 |
| 2013 | 1.766.521.000 | 7.024.159.000 | 1.054.357.000 | 9.845.037.000 |
| 2014 | 741.956.000 | 6.586.960.000 | 150.000.000 | 7.478.916.000 |
| 2015 | 1.500.000.000 | 10.463.926.000 | 1.207.620.000 | 13.171.546.000 |
| 2016 | 631.350.000 | 10.114.953.000 | 432.490.000 | 11.178.793.000 |

Sumber: Lakip BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata anggaran untuk kegiatan penelitian sebesar 13,64%, untuk kegiatan non penelitian 80,72% dan belanja modal 5,64%. Anggaran kegiatan penelitian digunakan untuk melaksanakan program maupun kegiatan penelitian yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, kegiatan non penelitian merupakan program maupun kegiatan guna menunjang kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Evaluasi, Seksi Sarana Penelitian dan Seksi Data, Informasi dan Kerjasama. Sedangkan anggaran belanja modal merupakan belanja yang dilakukan guna penambahan aset dalam menunjang kegiatan penelitian maupun non penelitian di BP2LHK Aek Nauli.

Perumusan Alternatif Strategi Melalui Analisis SWOT

Tabel 3. Hasil analisa matriks IFE Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli

| Faktor-faktor Strategis | | Bobot | Rating | Skor |
|-----------------------------------|---|-------|--------|--------------|
| Kekuatan (<i>Strengths-S</i>) | | | | |
| S1 | Komitmen pimpinan BP2LHK Aek Nauli | 0,121 | 3,71 | 0,448 |
| S2 | Tupoksi yang jelas bagi pengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) | 0,107 | 3,43 | 0,367 |
| S3 | Adanya dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra (Rencana strategis), Renja (Rencana kerja), kontrak kinerja, Petunjuk Operasional Kegiatan | 0,113 | 3,71 | 0,422 |
| S4 | Tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan dimengerti pelaksana kegiatan | 0,094 | 3,29 | 0,308 |
| S5 | Adanya kewenangan pimpinan BP2LHK Aek Nauli mengelola DIPA BP2LHK Aek Nauli | 0,098 | 3,43 | 0,337 |
| Total Kekuatan | | | | 1,882 |
| Kelemahan (<i>Weaknesses-W</i>) | | | | |
| W1 | Lemahnya kompetensi SDM dalam penyusunan anggaran, pengelola | 0,092 | 1,86 | 0,171 |

sampai dengan tahun 2016. Anggaran BP2LHK Aek Nauli dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga jenis belanja yaitu anggaran kegiatan penelitian, kegiatan non penelitian dan belanja modal. Anggaran belanja berdasarkan jenis belanja BP2LHK Aek Nauli tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.

Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Terdapat dua faktor yang penting menjadi tujuan yang hendak dijangkau dari persepsi para ahli yaitu faktor kunci internal (IFE) dan faktor kunci eksternal (EFE) yang dimiliki oleh BP2LHK Aek Nauli. Faktor kunci internal menghasilkan dua elemen faktor penting yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sementara faktor eksternal menghasilkan dua elemen faktor penting yaitu faktor peluang dan faktor ancaman. Analisis SWOT merupakan model analisis untuk membandingkan faktor kunci eksternal berupa peluang dan ancaman dengan faktor kunci internal berupa kekuatan dan kelemahan (Rangkuti 1997).

| keuangan dan pengukuran kinerja | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| W2 | Penyusunan anggaran belum melibatkan seluruh pegawai BP2LHK Aek Nauli | 0,090 | 1,57 | 1,141 |
| W3 | Lemahnya pengawasan internal | 0,094 | 1,71 | 0,161 |
| W4 | Evaluasi kinerja belum dikaitkan dengan visi dan misi | 0,092 | 1,29 | 0,118 |
| W5 | Tidak adanya penghargaan (<i>reward</i>) yang jelas dan sanksi (<i>punishment</i>) yang tegas | 0,099 | 1,43 | 0,142 |
| Total Kelemahan | | | | 0,733 |
| Total IFE | | 1,000 | 2,615 | |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Hasil perhitungan IFE menunjukkan total nilai tertimbang untuk faktor kekuatan sebesar 1,882 dan 0,733 untuk faktor kelemahan. Hal ini mengindikasikan bahwa BP2LHK Aek Nauli berada dalam posisi internal yang kuat dan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan faktor kelemahannya. Hasil perhitungan IFE menunjukkan bahwa komitmen pimpinan BP2LHK Aek Nauli dalam mendukung kinerja BP2LHK Aek Nauli yang lebih baik dengan nilai tertimbang paling tinggi sebesar 0,448 yang ditunjukkan dengan nilai rating 3,71. Faktor ini merupakan salah satu faktor kekuatan yang terpenting karena memiliki bobot paling tinggi sebesar 0,121.

Berdasarkan perhitungan untuk faktor kelemahan adalah lemahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan baik dalam penyusunan, pengelolaan dan evaluasi

anggaran, karena untuk merumuskan tolok ukur *output* dan *outcome* secara tepat dan baik membutuhkan sumberdaya manusia yang tepat (Nasir 2010). Ketidaksinkronan tugas dan latar belakang pendidikan dan minimnya pelatihan dan sosialisasi penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi anggaran merupakan kelemahan bagi BP2LHK Aek Nauli dengan nilai tertimbang sebesar 0,171. Berdasarkan wawancara dengan Kabag Program dan Kerjasama Sekretariat BLI mengatakan bahwa hubungan antara SDM dengan perencanaan anggaran sangat tinggi, untuk itu kompetensi SDM perencanaan perlu ditingkatkan kemampuannya dan selalu update dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan pengolahan data kuesioner untuk faktor kunci eksternal diperoleh hasil sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil analisa matriks EFE Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli

| Faktor-faktor Strategis | | Bobot | Rating | Skor |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Peluang (<i>Opportunities-O</i>) | | | | |
| 1 | Adanya dasar hukum yang jelas | 0,126 | 3,71 | 0,469 |
| 2 | Rekonsolidasi data antara KPPN dengan BP2LHK Aek Nauli setiap bulan | 0,099 | 2,71 | 0,269 |
| 3 | Pemberian insentif/honorarium bagi pengelola DIPA dalam meningkatkan kinerja | 0,090 | 2,57 | 0,233 |
| 4 | Tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat sesuai batas waktu | 0,114 | 2,86 | 0,327 |
| 5 | Peningkatan pelaksanaan pengawasan/monitoring kegiatan | 0,104 | 3,00 | 0,312 |
| Total Peluang (O) | | | | 1,609 |
| Ancaman (<i>Threats-T</i>) | | | | |
| 1 | Adanya penghematan anggaran | 0,082 | 1,86 | 0,152 |
| 2 | Belum adanya evaluasi rutin atas hasil pemeriksaan keuangan | 0,090 | 1,86 | 0,167 |
| 3 | Hasil penelitian belum menjadi acuan eselon lain | 0,104 | 2,43 | 0,252 |
| 4 | Ketidajelasan waktu penggunaan anggaran belanja sumber dana PNBK | 0,087 | 2,00 | 0,175 |
| 5 | Kegiatan penelitian pelaksanaannya tergantung musim | 0,103 | 2,29 | 0,236 |
| Total Ancaman (T) | | | | 0,981 |
| Total EFE | | 1,000 | 2,590 | |

Sumber: Data primer (2017), diolah



Total nilai tertimbang atau skor untuk faktor eksternal yang menjadi peluang adalah sebesar 1,609 sedangkan untuk ancaman memiliki skor atau nilai tertimbang sebesar 0,981. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa BP2LHK Aek Nauli memiliki faktor peluang yang lebih besar daripada faktor yang menjadi ancaman.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner menunjukkan bahwa faktor adanya dasar hukum yang jelas merupakan peluang utama dengan skor tertinggi yaitu 0,469. Faktor tersebut menjadi peluang yang memiliki tingkat kepentingan tinggi karena memiliki bobot sebesar 0,126 dan respon informan terhadap faktor tersebut tinggi dengan nilai rating 3,71.

Faktor ancaman hasil penelitian belum menjadi acuan eselon lain merupakan ancaman utama dengan nilai tertimbang sebesar 0,252 Faktor ini dianggap paling penting karena memiliki bobot sebesar 0,104 dan respon setiap informan dengan rating 2,43. menjadi kebijakan, SK Menhut, SNI ataupun terbit dalam jurnal internasional.

Penentuan alternatif strategi dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT dilakukan melalui interaksi kombinasi strategi internal maupun eksternal. Adapun perumusan strategi disusun berdasarkan faktor internal serta faktor eksternal ke dalam matriks SWOT seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks SWOT dan rekomendasi peningkatan kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli

| | | |
|--|---|---|
| IFE | S – KEKUATAN | W – KELEMAHAN |
| | <ol style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan BP2LHK Aek Nauli Tupoksi yang jelas bagi pengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan anggaran) Adanya dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra (Rencana strategis), Renja (Rencana kerja), kontrak kinerja, Petunjuk Operasional Kegiatan Tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan dimengerti pelaksana kegiatan Adanya kewenangan pimpinan BP2LHK Aek Nauli mengelola DIPA BP2LHK Aek Nauli | <ol style="list-style-type: none"> Lemahnya kompetensi SDM dalam penyusunan anggaran, pengelola keuangan dan pengukuran kinerja Penyusunan anggaran belum melibatkan seluruh pegawai BP2LHK Aek Nauli Lemahnya pengawasan internal Evaluasi kinerja belum dikaitkan dengan visi dan misi Tidak adanya penghargaan (reward) yang jelas dan sanksi (punishment) yang tegas |
| O – PELUANG | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Adanya dasar hukum yang jelas Rekonsolidasi data antara KPPN dengan BP2LHK Aek Nauli setiap bulan Pemberian insentif/honorarium bagi pengelola DIPA dalam meningkatkan kinerja Tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat sesuai batas waktu Peningkatan pelaksanaan pengawasan/ monitoring kegiatan | STRATEGI S – O | STRATEGI W – O |
| | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan komitmen mempedomani dokumen yang dibuat sebelumnya (S1,S2,S3,S4,S5,O3,O4,O5) Peningkatan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru (S1,S5,O2,O4,O5) | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja (O1,O5, W1) Meningkatkan komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja (W1,W2,W3,W5,O1,O3,O5) Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik.(W4,O1.O5) |
| T – ANCAMAN | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Adanya pemotongan anggaran/ <i>self blocking</i> Belum adanya evaluasi rutin atas hasil pemeriksaan keuangan Hasil penelitian belum menjadi acuan eselon lain Ketidajelasan waktu penggunaan anggaran belanja sumber dana PNBK Kegiatan penelitian pelaksanaannya tergantung musim | STRATEGI S – T | STRATEGI W – T |
| | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan (S1,S4,T2,T5) Mengalokasikan anggaran PNBK pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim (S1,S3S4,S5,T4) Membuat susunan anggaran alternatif (S1,S2,S3S4,S5,T4.T1) | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders lokal.(W4,W5,T3,T5) Peningkatan diseminasi hasil penelitian. (W2,T3,T4) |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Berdasarkan matrik SWOT,dapat dirumusan beberapa strategi dengan mengalokaborasikan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor- faktor eksternal (peluang dan ancaman).

1. Strategi SO:
 - a. Peningkatan komitmen mempedomani dokumen yang dibuat sebelumnya (S1,S2,S3,S4,S5,O3,O4,O5)
 - b. Peningkatan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru (S1,S5,O2,O4,O5)
2. Strategi ST:
 - a. Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.(S1,S4,T2,T5)
 - b. Mengalokasikan anggaran PNBPN pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim (S1,S3,S4,S5,T4)
 - c. Membuat susunan anggaran alternatif (S1,S2,S3S4,S5,T4.T1)
3. Strategi WO:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja (O1,O5, W1)

- b. Meningkatkan komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja (W1,W2,W3,W5,O1,O3,O5)
 - c. Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik.(W4,O1.O5)
4. Strategi WT:
 - a. Peningkatan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders lokal.(W4,W5,T3,T5)
 - b. Peningkatan diseminasi hasil penelitian. (W2,T3,T4)

Tahap selanjutnya dalam perumusan strategi meningkatkan kinerja BP2LHK Aek Nauli adalah QSPM. Penggunaan QSPM bertujuan untuk memperoleh prioritas strategi terbaik yang paling menarik untuk diimplementasikan sesuai dengan arah dan kebijakan BP2LHK Aek Nauli. Setelah dilakukan analisa dan perhitungan diperoleh hasil perumusan strategi prioritas menggunakan QSPM di BP2LHK Aek Nauli yang diperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Strategi peningkatan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli

| No | Strategi | Skor | Ranking |
|----|--|-------|---------|
| 1 | Peningkatan komitmen mempedomani dokumen yang telah dibuat sebelumnya | 6,099 | 5 |
| 2 | Peningkatan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru | 6,355 | 3 |
| 3 | Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja | 6,747 | 1 |
| 4 | Meningkatkan komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja | 6,735 | 2 |
| 5 | Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik | 5,738 | 6 |
| 6 | Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan | 6,100 | 4 |
| 7 | Mengalokasikan anggaran PNBPN pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim | 3,981 | 10 |
| 8 | Membuat susunan anggaran alternatif | 5,064 | 8 |
| 9 | Peningkatan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan <i>stakeholderes</i> lokal | 5,108 | 7 |
| 10 | Peningkatan diseminasi hasil penelitian | 4,921 | 9 |

Sumber: Data primer (2017), diolah

Tabel 6 menunjukkan ada sepuluh srategi peningkatan kinerja BP2LHK Aek Nauli, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja

2. Meningkatkan komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja
3. Peningkatan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru
4. Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
5. Peningkatan Komitmen mempedomani dokumen yang telah dibuat sebelumnya.
6. Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik.
7. Peningkatan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders lokal.
8. Membuat susunan anggaran alternatif
9. Peningkatan diseminasi hasil penelitian.
10. Mengalokasikan anggaran PNBPN pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 4. Rumusan strategi peningkatan kinerja BP2LHK Aek Nauli adalah (1) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memahami proses pengukuran kinerja. (2) Meningkatkan komunikasi antar pegawai baik pelayanan, kinerja maupun pengukuran kinerja. (3) Meningkatkan sosialisasi sehingga cepat mendapat informasi terkait peraturan terbaru. (4) Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. (5) Meningkatkan komitmen mempedomani dokumen yang telah dibuat sebelumnya. (6) Menyusun kegiatan yang mengacu visi dan misi dan menghasilkan pelayanan publik yang baik. (7) Meningkatkan kerjasama pemanfaatan hasil litbang dengan stakeholders lokal. (8) Membuat susunan anggaran alternatif. (9) Meningkatkan diseminasi hasil penelitian. (10) Mengalokasikan anggaran PNBPN pada program yang memiliki keterkaitan dengan musim.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, saran yang dapat diberikan yaitu mengenai perlunya peningkatan kompetensi pada SDM BP2LHK Aek Nauli dalam menyusun Lakip agar mampu mengumpulkan, membaca dan menganalisis data kinerja secara keseluruhan sehingga penyusun tidak hanya menerima data saja tetapi mampu mengevaluasi data tersebut secara mendalam sehingga data Lakip maupun data evaluasi kinerja nantinya dapat digunakan manajemen dalam memperbaiki kinerja, pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta (ID): Erlangga.
- [BP2LHKAN] Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli. 2016. Laporan Akuntabilitas Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli tahun 2016. Aek Nauli (ID): BP2LHKAN.
- [BPKAN] Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. 2012. Laporan Akuntabilitas Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli tahun 2012. Aek Nauli (ID): BPKAN.
- [BPKAN] Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. 2013. Laporan Akuntabilitas Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli tahun 2013. Aek Nauli (ID): BPKAN.
- [BPKAN] Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. 2014. Laporan Akuntabilitas Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli tahun 2014. Aek Nauli (ID): BPKAN.
- [BPKAN] Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. 2015. Laporan Akuntabilitas Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli tahun 2015. Aek Nauli (ID): BPKAN.
- Hasan A. 2016. Strategi Maksimalisasi Penyerapan Anggaran Belanja Triwulan III pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Monokwari [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Nasir M. 2010. *Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Dampaknya pada Kinerja* [Pidato

Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

Liando GY, Elim I. 2016. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe. *Jurnal EMBA*. 4 (1): 1473-1484.

Rangkuti F. 1997. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: (ID): Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung (ID): Alfabeta.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rosy Novriyandi¹, Dedi Budiman Hakim², Ernan Rustiadi³

¹Mahasiswa Departemen Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB

ABSTRACT

Poverty and income inequality are strategic social issues often faced by various regions in the Unitary State of the Republic of Indonesia, especially in newly expanded areas such as the Bangka Belitung Islands Province. One of the development issues in the Bangka Belitung Islands Province, which is included in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2017-2022, is related to the levels of poverty and income inequality. This research aims to analyze the factors influencing poverty and income inequality in the Bangka Belitung Islands Province using a static panel data method during the period 2007-2016. The results of this study show that economic growth has been effective in reducing the poverty rate but not in reducing income inequality. Income inequality may hinder or reduce the effectiveness of economic growth in reducing the poverty rate. Statistically, the sectors that have a positive and significant impact on reducing poverty and income inequality are the service sector and agricultural sector. The inflation rate has a negative and significant effect on the poverty rate, but the opposite effect on income inequality. Government expenditure has a positive and significant effect on reducing income inequality, but not on the poverty rate. In addition, the population has a negative and significant effect on income inequality.

Keywords: Panel Data, Poverty, Income Inequality, Economic Growth

ABSTRAK

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan isu dimensi sosial strategis yang sering dihadapi oleh berbagai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang baru saja mengalami pemekaran, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu isu pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 adalah terkait dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan metode panel statis selama periode 2007-2016. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi belum pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan akan menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan secara statistik sektor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah sektor jasa dan pertanian. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tetapi berbanding terbalik pada tingkat ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, tetapi belum pada tingkat kemiskinan. Selain itu, jumlah penduduk juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Data Panel, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonom

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Kuncoro 2004). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno 2000).

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi (Warr 2006). Ekonomi yang semakin

bertumbuh berdasarkan teori klasik dan neoklasik akan menciptakan dan menghasilkan daya tetes ke bawah (*trickle down effect*) yang sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan kepada segenap masyarakat (Tambunan 2003). Teori tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tiang penting dalam proses pengentasan berbagai persoalan sosial terutama kemiskinan dan ketimpangan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi yang mengalami pemekaran, sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah

dengan penambahan empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki total luas wilayah mencapai 81.725,23 kilometer persegi, dengan luas daratan 16.424,23 kilometer persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 1.401.827 jiwa dengan kepadatan penduduk 86 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, dengan luas wilayah 17,97% dan 0,72% dari luas keseluruhan provinsi, kedua kota ini masing-masing ditempati oleh 22,67% dan 14,29% penduduk (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah penduduk dan luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase (%) | Luas Wilayah (Km ²) | Persentase (%) | Kepadatan Pednduduk (Jiwa/Km ²) |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---|
| Kabupaten Bangka | 317.735 | 22,76 | 2.950,69 | 17,97 | 108 |
| Kabupaten Belitung | 178.721 | 12,75 | 2.293,69 | 13,97 | 78 |
| Kabupaten Bangka Barat | 200.684 | 14,32 | 2.820,61 | 17,17 | 72 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 184.720 | 13,18 | 2.126,36 | 12,95 | 87 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 197.670 | 14,10 | 3.607,08 | 21,96 | 55 |
| Kabupaten Belitung Timur | 121.971 | 8,70 | 2.507,00 | 15,26 | 49 |
| Kota Pangkalpinang | 200.326 | 14,29 | 118,80 | 0,72 | 1.687 |
| Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1.401.827 | 100 | 16.424,23 | 100 | 86 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan pada tahun 2010-2016 terus mengalami kenaikan. Sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya jika terjadi guncangan pada sektor-sektor tersebut juga akan memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian secara keseluruhan (Tabel 2).

Tabel 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (Milyar Rupiah) tahun 2010-2016

| Lapangan Usaha/Industry | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015* | 2016** |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Pertanian | 6097.7 | 6642.8 | 7072.9 | 7557.7 | 8254.3 | 8747.9 | 9119.2 |
| 2. Pertambangan | 6077.4 | 6263.6 | 6270.1 | 6230.2 | 6354.1 | 6464.4 | 6495.4 |
| 3. Industri | 9174.7 | 9515.8 | 9804.9 | 10143.3 | 10270.3 | 10400.8 | 10668.4 |
| 4. Listrik, gas dan | 30.3 | 33.9 | 37.1 | 38.80 | 43.3 | 47.0 | 52.3 |
| 5. Bangunan | 2531.9 | 2758.3 | 3133.8 | 3414.7 | 3552.4 | 3759.9 | 4018.0 |
| 6. Perdagangan, | 5163.5 | 5970.5 | 6399.1 | 6777.6 | 7139.9 | 7437.0 | 7815.1 |
| 7. Pengangkutan | 1740.3 | 1897.9 | 2064.0 | 2225.0 | 2361.7 | 2507.3 | 2676.2 |
| 8. Keuangan, | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| persewaan dan jasa perusahaan | 1572.1 | 1773.8 | 1941.1 | 2149.0 | 2286.2 | 2362.2 | 2474.5 |
| 9. Jasa-jasa | 2874.0 | 3157.5 | 3381.9 | 3654.4 | 3897.0 | 4235.9 | 4573.1 |
| PDRB dengan Migas | 3,5261.9 | 3,8014.1 | 4,0104.9 | 4,2190.7 | 4,4159.2 | 4,5962.4 | 4,7892.2 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017), diolah

Catatan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pertumbuhan PDRB menunjukkan tren yang terus mengalami kenaikan, tetapi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,90%, selanjutnya sampai dengan tahun 2015 terus mengalami perlambatan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4,11% (BPS 2017). Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang fluktuatif ini dirasa penting untuk diteliti, apakah menimbulkan dampak terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena ini penulis menilai perlu dilakukan sebuah kajian, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Data yang digunakan adalah data 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Sumber data utama yaitu berbagai publikasi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Kabupaten Bangka, BPS Kabupaten Belitung, BPS Kabupaten Bangka Barat, BPS Kabupaten Bangka Tengah, BPS Kabupaten Bangka Selatan, BPS Kabupaten Belitung Timur, BPS Kota Pangkalpinang dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah di Kepulauan Bangka Belitung.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode panel data untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software* Stata. Sedangkan analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil data kuantitatif mengenai kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Model Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara *cross section* dan *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Terdapat dua keuntungan penggunaan model data panel. Pertama, dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam data panel membuat jumlah observasi menjadi lebih besar. Penggunaan data panel *marginal effect* dari peubah penjelas dilihat dari dua dimensi yaitu individu dan waktu sehingga parameter yang diestimasi akan lebih akurat dibandingkan dengan model lain.

Perumusan Model Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

1. Model kemiskinan dengan variabel lainnya

$$PI_{it} = \beta_0 + \beta_1 Growth_{it} + \beta_2 Inflasi_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 Pertanian_{it} + \beta_5 Industri_{it} + \beta_6 Jasa_{it} + \beta_7 PP_{it} + \epsilon_{it}$$

..... (1)

2. Model ketimpangan dengan variabel lainnya

$$Gini_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Growth_{it} + \alpha_2 JP_{it} + \alpha_3 Inf_{it} + \alpha_4 Pertanian_{it} + \alpha_5 Industri_{it} + \alpha_6 Jasa_{it} + \alpha_7 PP_{it} + \epsilon_{it}$$

..... (2)

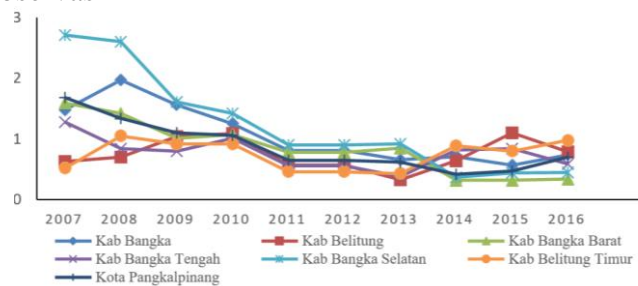
Keterangan:

- α, β : koefisien regresi
- β_0, α_0 : intersep
- PI_{it} : indeks kedalaman kemiskinan (persen)
- $Gini_{it}$: gini ratio (persen)
- $Growth_{it}$: laju pertumbuhan ekonomi (persen)

- JPit* : jumlah penduduk (ribu jiwa)
- INFit* : inflasi (persen)
- TPTit* : Tingkat pengangguran terbuka (persen)
- Pertanianit* : PDRB sektor pertanian (milyar rupiah)
- Industriit* : PDRB sektor industri pengolahan (milyar rupiah)
- Jasait* : PDRB sektor jasa (milyar rupiah)
- PPit* : pengeluaran pemerintah (milyar rupiah)
- €it* : residu
- i* : kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- t* : tahun observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung, sebesar 0,8% dan 0,79%. Sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan terendah berada pada Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,34%, diikuti oleh Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,45%. Hal yang menarik untuk diperhatikan yaitu sampai tahun 2016 hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan indeks kemiskinan, kecuali Kabupaten Belitung Timur dan Belitung (Gambar 1).



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

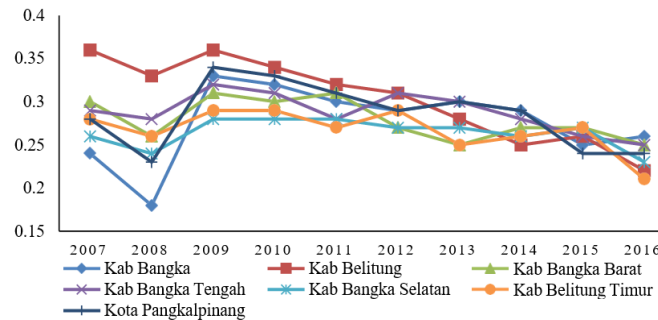
Gambar 1. Indeks kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2016

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa pada kedua kabupaten ini terjadi peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sehingga berdasarkan indikator tersebut terlihat bahwa kondisi kemiskinan pada Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung semakin memburuk.

Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ketimpangan pendapatan yang dijelaskan dengan nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik jika

dibandingkan dengan Nasional. Pada tahun 2007-2016 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan, semula pada tahun 2007 sebesar 0,26% dan terus bergerak fluktuatif sampai dengan 0,28% di Tahun 2016 (BPS 2017). Jika dilihat dari rata-rata gini ratio, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang memiliki nilai rata-rata gini rasio tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya sebesar 0,30%, 0,29% dan 0,29%. Sedangkan nilai rata-rata gini rasio terendah berada pada Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,26% (Gambar 2).



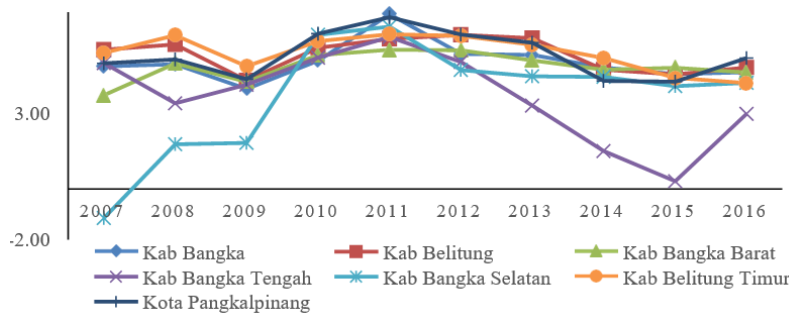
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017), diolah

Gambar 2. Gini rasio kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena lebih dari setengah sektor lapangan usaha secara relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015-2016, Kota Pangkalpinang memiliki laju pertumbuhan

ekonomi tertinggi sebesar 5,17% kemudian diikuti oleh Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka sebesar 4,81% dan 4,62%. Sedangkan kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah masih ditempati oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% (Gambar 3).



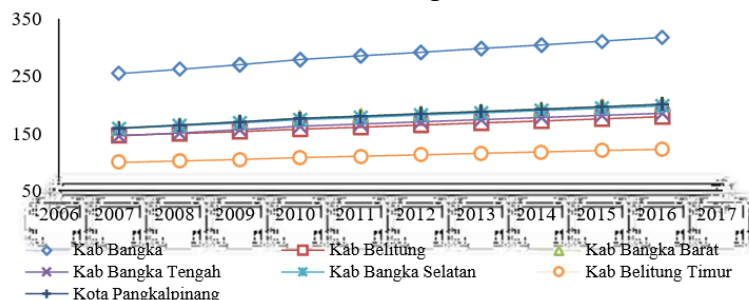
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 3. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 sebanyak 1.119.186 jiwa. Dalam masa sepuluh tahun (2007-2016) terjadi peningkatan yang besar menjadi 2,8 ribu jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dikisaran 2-3% per tahun, sehingga pada tahun 2016 mencapai 1.401.827

jiwa dengantingkat kepadatan penduduk mencapai 86 orang per km². Apabila dilihat menurut kabupaten kota, dari tahun 2007 sampai dengan 2016, Kota pangkalpinang memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan tingkat kepadatan sebesar 1.686 jiwa per km² dan Kabupaten Belitung Timur memiliki jumlah penduduk terendah dengan tingkat kepadatan sebesar tahun 2016 sebesar 50 jiwa per km² (Gambar 4).



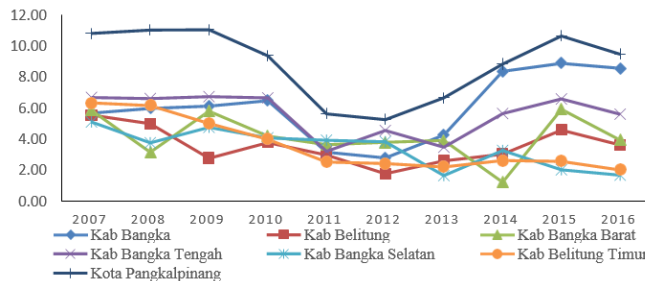
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 4. Jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Tingkat Pengangguran Terbuka

Kota Pangkalpinang adalah kota dengan tingkat pengangguran tertinggi. Pada tahun 2016 Kota Pangkalpinang memiliki tingkat pengangguran sebesar 9,47%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bangka

sebesar 8,59%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah berada pada Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur memiliki sebesar 1,67% dan 2,00% (Gambar 5).

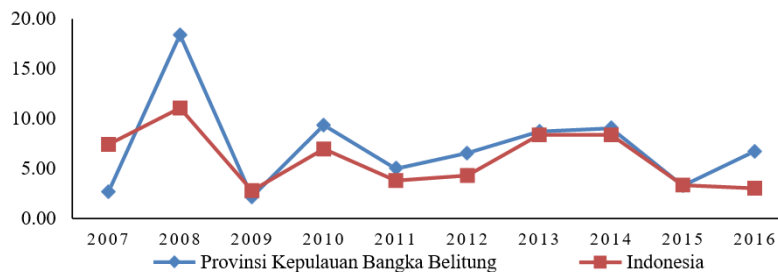


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Sepanjang periode tahun 2007-2016 inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak fluktuatif. Hampir setiap periode inflasi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional (Gambar 6).

Inflasi



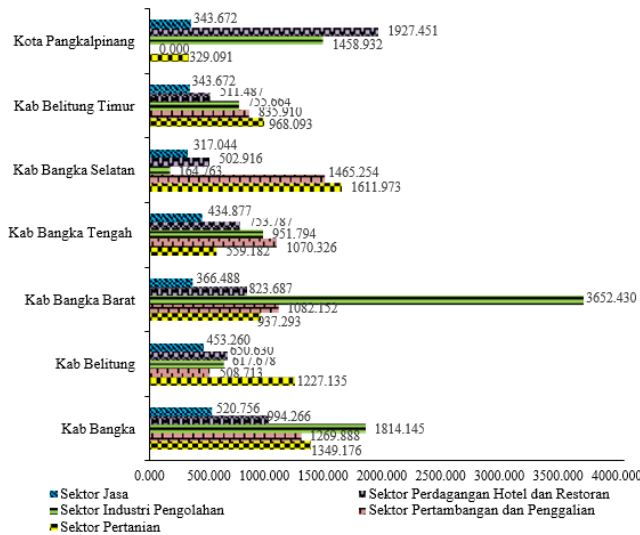
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 6. Inflasi Indonesia dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Inflasi tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 sebesar 18,40%, akibat dampak krisis keuangan global. Selanjutnya terus bergerak fluktuatif sampai dengan tahun 2011. Pada periode tahun 2012-2014, inflasi terus mengalami kenaikan sampai dengan 9,04%. Kemudian pada tahun selanjutnya 2015 inflasi menurun sebesar 3,27% dan meningkat kembali menjadi 6,75% di tahun 2016. Jika dicermati, berdasarkan kelompok pengeluaran. Kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya terjadi pada kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kelompok transportasi dan komunikasi.

Perkembangan Sektor Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar bagi sektor pertambangan dan penggalian yaitu: Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Selanjutnya kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar pada sektor pertanian yaitu: Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan Kabupaten Bangka tengah memiliki kontribusi terbesar pada sektor pertambangan dan penggalian, serta Kota Pangkalpinang di sektor perdagangan hotel dan restoran (Gambar 7).



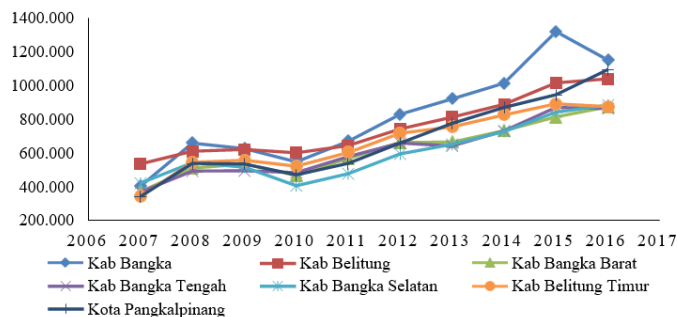
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 7. Rata-rata perkembangan sektor-sektor pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengeluaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengeluaran pemerintah yang cukup baik dengan dengan tingkat penyerapan anggaran yang terus mengalami peningkatan.

Sampai dengan tahun 2016 pengeluaran pemerintah terbesar berada pada Kabupaten Bangka, kemudian diikuti Kota Pangkalpinang, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kabupaten Bangka dan Kota pangkalpinang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya (Gambar 8).



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 8. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2016

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan menggunakan ukuran indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*), menunjukkan bahwa model *Feasible Generalized Least Square (FGLS)* merupakan model yang terbaik. Model FGLS dipilih karena model terbaik *Fixed Effect* melanggar asumsi klasik berupa heterokedastisitas dan autokorelasi. Tujuan dari penggunaan FGLS

adalah agar masalah heterokedastisitas dan autokorelasi benar-benar dapat dikoreksi sehingga model terbebas dari masalah heterokedastisitas dan autokorelasi dalam model data panel. Pada model ini terdapat empat variabel bebas yang signifikan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan PDRB sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi (*growth*) secara statistik memiliki hubungan negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,179 (Tabel 3). Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar -0,179%. Hasil pertumbuhan ekonomi yang berhubungan

negatif terhadap tingkat kemiskinan serupa dengan penelitian dari Sudarlan (2015) dan Wijayanto (2016). Kondisi ini membuktikan proses *trickle down effect* terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3. Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Variabel Bebas | Model 1 (Kemiskinan) | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | OLS | FEM | REM | FGLS | Elastisitas |
| C | 1.7513* (0.000) | 3.0723* (0.000) | 1.7513* (0.000) | 3.5986* (0.000) | |
| Growth | -0.1495* (0.000) | -0.1791* (0.000) | -0.1495* (0.000) | -0.1791* (0.000) | -0.950* |
| Inf | 0.0200** (0.029) | 0.0122* (0.007) | 0.0200** (0.025) | 0.0122** (0.075) | 0.098** |
| Tpt | 0.0607* (0.011) | 0.0038 (0.872) | 0.0607* (0.009) | 0.0038 (0.857) | 0.001 |
| Pertanian | 0.0004* (0.011) | -0.0008** (0.026) | 0.0004* (0.009) | -0.0008* (0.011) | -0.882* |
| Industri | 9.33e-06 (0.814) | 0.0001 (0.723) | 9.33e-06 (0.813) | 0.0001 (0.691) | 0.128 |
| Jasa | 0.0001 (0.872) | -0.0019** (0.045) | 0.0001 (0.871) | -0.0019** (0.022) | -0.975** |
| PP | -0.0015* (0.000) | 0.0002 (0.783) | -0.0025* (0.000) | 0.0002 (0.757) | 0.125 |
| Wilayah | | | | | |
| Kabupaten Belitung | | | | -0.3604 (0.196) | |
| Kabupaten Bangka Barat | | | | -0.9741** (0.032) | |
| Kabupaten Bangka Tengah | | | | -1.2087* (0.000) | |
| Kabupaten Bangka Selatan | | | | -0.0548 (0.888) | |
| Kabupaten Belitung Timur | | | | -0.7593* (0.005) | |
| Kota Pangkalpinang | | | | -0.3262 (0.467) | |

Keterangan:

Nilai dalam () merupakan nilai *p-value*

*, **, *** signifikan pada 1%, 5%, 10%

Sumber: Data primer (2019), diolah

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa secara statistik inflasi (*inf*) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,0122. Artinya kenaikan inflasi sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan indeks

kedalaman kemiskinan sebesar 0,0122%. Tingkat inflasi yang tinggi menurut Endrayani dan Dewi (2016) akan menyebabkan tingkat harga terutama barang-barang kebutuhan pokok akan melonjak drastis, hal ini bisa saja membuat masyarakat menengah

bertransformasi menjadi masyarakat yang memasuki zona kemiskinan karena berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat.

PDRB pada sektor pertanian (pertanian) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kedalaman kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,0008. Artinya, peningkatan sektor pertanian sebesar 1 milyar rupiah akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar -0,0008%. Sementara itu, PDRB sektor jasa (jasa) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,0019. Artinya peningkatan sektor jasa sebesar 1 milyar rupiah akan menurunkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar -0,0019%. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Warr

(2006) dan Putra et al. (2015). Sektor jasa dalam penelitian ini mencakup pada dari jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial beserta jasa lainnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran indeks gini (*Gini Ratio*). Pada model ini terdapat lima variabel bebas yang signifikan yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: jumlah penduduk, tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan sektor jasa dan pengeluaran pemerintah.

Tabel 4. Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Variabel Bebas | Model 2 (Ketimpangan Pendapatan) | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | OLS | FEM | REM | FGLS | Elastisitas |
| C | 0.3083** (0.019) | -0.2248** (0.025) | 0.3083* (0.000) | -0.6608* (0.000) | |
| Growth | 0.0066** (0.019) | -0.0003 (0.907) | 0.0066** (0.016) | -0.0003 (0.896) | -0.006 |
| Jp | 0.0002 (0.113) | 0.0047* (0.000) | 0.0002 (0.108) | 0.0047* (0.000) | 3.054* |
| Inf | -0.0025* (0.002) | -0.0022* (0.001) | -0.0251* (0.001) | -0.0022* (0.000) | -0.056* |
| Pertanian | -0.0000 (0.125) | -0.0001* (0.001) | -0.0000 (0.120) | -0.0001* (0.000) | -0.437* |
| Industri | -4.55e-06 (0.255) | 0.0000 (0.470) | -4.55e-06 (0.251) | 0.0000 (0.416) | 0.072 |
| Jasa | -0.0000 (0.457) | -0.0003* (0.004) | -0.0000 (0.454) | -0.0003* (0.001) | -0.537* |
| PP | -0.0004 (0.237) | -0.0001** (0.023) | -0.0000 (0.233) | -0.0001* (0.009) | -0.284* |
| Wilayah | | | | | |
| Kabupaten Belitung | | | | 0.5912*** (0.000) | |
| Kabupaten Bangka Barat | | | | 0.3527*** (0.000) | |
| Kabupaten Bangka Tengah | | | | 0.4468*** (0.000) | |
| Kabupaten Bangka Selatan | | | | 0.4664*** (0.000) | |
| Kabupaten Belitung Timur | | | | 0.7196*** (0.000) | |

Keterangan:

Nilai dalam () merupakan nilai *p-value*

*, **, *** signifikan pada 1%, 5%, 10%

Sumber: Data primer (2019), diolah

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa Inflasi (inf) memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien -0,0022%. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Rahmani YP (2011). Artinya kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar -0,002%. Inflasi yang tinggi akan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

Sektor pertanian (pertanian) berhubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya peningkatan sektor pertanian sebesar 1 milyar rupiah akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sebesar -0,0001%. Peningkatan kontribusi sektor pertanian berarti meningkatkan produktivitas sektoral yang selanjutnya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektor tersebut.

Sektor jasa (jasa) berhubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien -0,0003%. Hal ini senada dengan penelitian Nangarumba (2015) yang menunjukkan hasil negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan sektor jasa sebesar 1 milyar akan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi, PDRB, sektor jasa dan sektor pertanian berhubungan negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk berhubungan positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Inflasi, PDRB sektor pertanian dan sektor jasa, serta pengeluaran pemerintah berhubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan sebesar -0,0003%.

Pengeluaran Pemerintah (pp) berhubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan tingkat. Hal ini senada dengan penelitian Harun dan Maski (2012) yang menunjukkan hasil negatif terhadap ketimpangan pendapatan ketimpangan, artinya peningkatan 1 milyar pengeluaran pemerintah akan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan sebesar -0,0001%.

Pertumbuhan ekonomi (*growth*) memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk (jp) memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum begitu efektif terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan, hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat pada golongan tertentu. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya peningkatan jumlah penduduk sebesar seribu jiwa akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0047%.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, akan tetapi belum memberikan dampak terhadap ketimpangan, untuk itu diperlukan regulasi kebijakan yang tepat oleh otoritas pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang *pro poor*, *pro growth*, *pro-job* dan *pro environment* yang berfokus pada sektor pertanian dan sektor jasa dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah hendaknya menjaga tingkat inflasi, ledakan jumlah penduduk, dan meningkatkan efektifitas anggaran pemerintah dengan berbagai program pendukung dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bantika V, Suzana BOL, Kapantow GHM. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ketimpangan Distribusi Pendapata di Sulawesi Utara. *EJournal Unsrat*. 6 (17): 1-33.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2007. Pangkalpinang (ID).
- Candra A, Riandoko B, Saskia DY. 2012. Keterkaitan Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2010. *Jurnal Media ekonomi dan teknologi Informasi*. 20 (2): 44-57.
- Endrayani NKE, Dewi MHU. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 5 (1):63-88.
- Jonaidi A. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian ekonomi*. 1 (1): 140-164.
- Putri YE, Amar S, Aimon H. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 3 (6): 1-18.
- Romli MS, Hutagaol MP, Priyarsono D S. (2016). Transformasi Struktural: Faktor- Faktor dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan di Madura. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*. 5 (1): 25-44.
- Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (2): 418-428.
- Zebua WN, Bakce D, Hadi S. 2015. Analisis Faktotr-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Kemiskinan di

Provinsi Riau. *Indonesia Journal of Agricultural Economics*. 6 (2): 158-167.

Zuhdiyaty N, Kaluge D. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesi Selam Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Jibeka*. 11 (2): 27-31.



STRATEGI KEBERLANJUTAN DALAM MEMPERTAHANKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KABUPATEN BOGOR

Judo Satria¹, A Faroby Falatehan, Irfan Syauqi Beik³

¹Mahasiswa Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

²Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

³Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACT

This research is conducted based on the challenges faced by the agricultural sector in Bogor Regency, namely the conversion of rice fields. This conversion occurs due to population growth and economic development in the Bogor Regency, which serves as a buffer zone for the Special Capital Region of Jakarta. The aim of this research is to formulate alternative strategies as efforts for sustainable protection of agricultural land in Bogor Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Based on the results of the AHP vertical analysis, at the priority factor level is Community Empowerment. At the stakeholder level, private sector prioritizes Community Empowerment. The constraint level prioritizes Lack of Collaboration with Local Government. At the alternative strategy level, the priority is the Establishment of a Sustainable Agricultural Land Control Team with academic support.

Keywords: Agricultural Land Conversion, Analytic Network Process, Food Agricultural Land, Strategy

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Kabupaten Bogor berupa alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan hasil (AHP) analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta. Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi

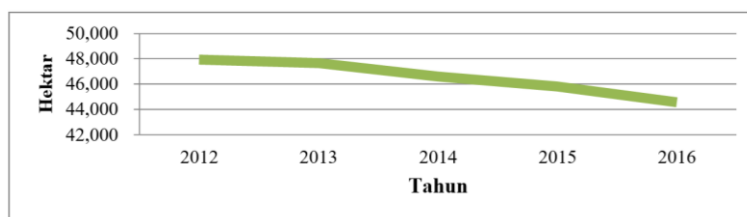
Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan Pertanian, *Analytic Network Process*, Lahan Pertanian Pangan, Strategi

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut. Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama penyakit, kekeringan, banjir dan faktor lainnya lebih bersifat sementara, maka penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan

pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional. Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara berkembang dengan cepat baik dari sisi pertumbuhan penduduk, ekonomi maupun infrastruktur.

Kepadatan penduduk di perkotaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan kota. Konversi lahan pertanian di wilayah pinggiran kota menjadi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi persoalan penambahan penduduk. Oleh karena itu, konversi lahan semakin sulit untuk dikendalikan. Terlihat pada Gambar 1.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor (2017)

Gambar 1. Luas lahan pertanian tahun 2012-2016 di Kabupaten Bogor

Gambar menunjukkan penurunan jumlah lahan sawah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimulai dari Tahun 2012 s/d 2013 sebanyak 269 ha, Tahun 2013 s/d 2014 sebanyak 1080 ha. Tahun 2014 s/d 2015 sebanyak 785 ha dan tahun 2015 s/d 2016

sebanyak 1251 ha dengan jumlah total 3385 ha dalam kurun waktu 5 tahun. Kondisi ini tentu memberikan dampak terhadap pemenuhan konsumsi pangan utama berupa beras. Persentase pemenuhan beras sejak tahun 2014 s/d 2017 masih deficit (Tabel 1).

Tabel 1. Pemenuhan konsumsi pangan utama (beras) tahun 2014-2017 di Kabupaten Bogor

| Tahun | Jumlah Penduduk | Kebutuhan Beras (ton) | Produksi Beras (ton**) | Pemenuhan (%) |
|-------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 2014 | 5.331.149 | 564.302 | 356.261 | 63,13 |
| 2015 | 5.459.668 | 520.693 | 311.721 | 59,87 |
| 2016 | 5.587.390 | 545.720 | 369.434 | 67,70 |
| 2017 | 5.715.009 | 558.185 | 334.701 | 61,75 |

Keterangan: Konsumsi beras 97,67 kg/Kap/th (Susenas, BPS 2014)

** 63,2% GKG

Sumber: Dinas tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor (2017)

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengupayakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan secara berkelanjutan

sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi petani. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai bagaimana strategi pengendalian alih fungsi terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor dengan pertimbangan:

1. Kabupaten Bogor sebagai daerah yang strategis yakni menjadi hinterland atau penyangga dari Ibu Kota Negara Indonesia maupun terhadap Kota Bogor.
2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan permintaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal kebutuhan pangan dan perumahan/pemukiman semakin meningkat.
3. Terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.

4. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cihideung Ilir Kabupaten Bogor. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan alasan berdasarkan pengamatan sebelumnya lokasi tersebut mampu menjawab permasalahan dalam penelitian secara spesifik. Selain itu, lokasi tersebut merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciampea yang memiliki tingkat konversi lahan pertanian yang cukup tinggi sementara sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.
5. Waktu Penelitian dilaksanakan dimulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus 2018.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder. Data primer berupa data wawancara mendalam terhadap pengambil kebijakan lingkup Kabupaten Bogor serta petani sampel di petak lahan yang terpilih, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan Dinas Teknis dan peta sawah Kabupaten Bogor tahun 2017. Sedangkan data sekunder yaitu berupa luas lahan sawah Kabupaten Bogor tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan lokasi rencana penetapan PLP2B bersumber dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kajian PSP3 Institut Pertanian Bogor, juga peta dari Badan Informasi Geospasial tentang luasan lahan pertanian sawah di Kabupaten Bogor, laporan dan dokumen serta publikasi yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Bappedalitbang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kementerian Pertanian, serta berbagai jurnal, materi seminar dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode Pemilihan Responden

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan 30 responden yang merupakan petani yang mengetahui tentang alih fungsi lahan pertanian di Desa Cihideung ilir. Pemilihan responden untuk analisis AHP menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto 2006).

Tabel 2. Produktivitas padi sebagai bahan pangan utama di Kabupaten Bogor tahun 2013-2015

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Padi sawah (Kw/ha) | 60,41 | 63,94 | 63,36 |
| 2 | Padi gogo (Kw/ha) | 33,87 | 33,82 | 32,69 |

Sumber: Distanhut dalam LKPj (2016), diolah

Produktivitas padi gogo di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 33,87 kw/ha. Produktivitas ini cenderung menurun sampai tahun 2015 dengan produktivitas awal di tahun 2013 sebesar 33,87 kw/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas padi mencapai 32,69 kw/ha.

Luas Wilayah Produktif

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi dalam upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menurut Saaty (1993), AHP merupakan model yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an. AHP didesain untuk menangkap persepsi orang secara rasional yang berhubungan dengan permasalahan tertentu melalui sebuah tahapan yang dirancang sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai alternatif. Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Penyusunan strategi tersebut dilakukan oleh ahli-ahli yang kompeten dan mewakili yang berkaitan dengan alternatif yang akan disusun prioritasnya. Analisis AHP ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terukur (kuantitatif), yang memerlukan pendapat (*judgement*) maupun pada situasi yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas Padi Sebagai Bahan Pangan Utama

Produktivitas padi sawah di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 mencapai 63,36 kw/ha. Produktivitas ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2014), di mana pada tahun 2014 produktivitas padi mencapai 63,94 kw/ha.

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional ini kemudian disebut sebagai

kawasan andalan (produktif). Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya. Dalam Kawasan Andalan

diidentifikasi sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Kawasan Andalan ditetapkan untuk mengupayakan sinergi keselarasan pengembangan antar wilayah dan antar sektor. dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas wilayah produktif di Kabupaten Bogor tahun 2013-2015

| Tahun | Luas Wilayah Produktif (Ha) | Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha) | Persentase Luas Wilayah Produktif (%) |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 2013 | 143.800 | 165.289,90 | 87,00 |
| 2014 | 143.800 | 165.289,90 | 87,00 |
| 2015 | 143.800 | 165.289,90 | 87,00 |

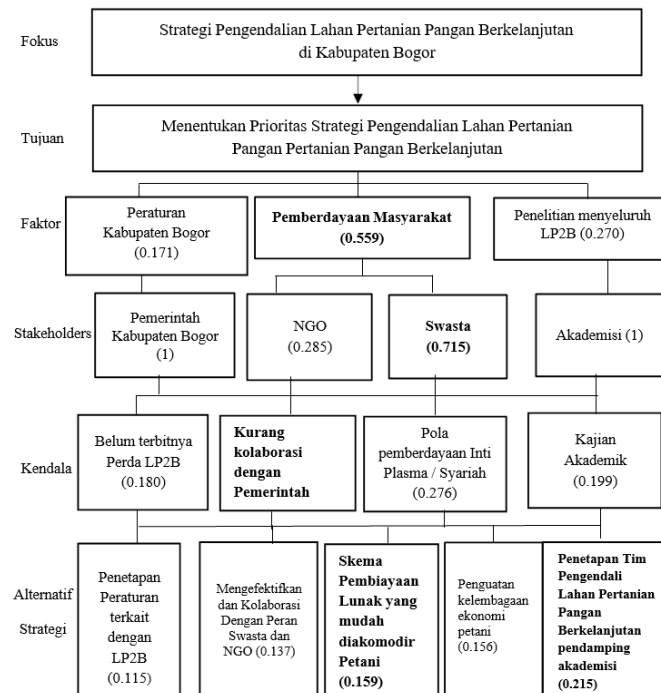
Sumber: Bappeda dalam LKPj (2016)

Indikator ini mengukur luas wilayah produktif dibandingkan dengan luas seluruh wilayah dan mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Bogor tahun 2013-2015 menunjukkan pola stagnan.

Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor

Metode AHP digunakan dalam penentuan prioritas strategi pengambilan

keputusan berdasarkan alternatif-alternatif strategi yang ada dengan menggunakan software *Expert Choice* 2000. Pada tingkat pertama terdapat fokus, yaitu masalah yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama, tingkat kedua adalah faktor yang mempengaruhi strategi, tingkat ketiga adalah aktor penting dalam menentukan strategi penentuan kebijakan, tingkat keempat adalah tujuan yang ingin dicapai dan tingkat kelima adalah alternatif-alternatif strategi yang dipilih oleh pengambil kebijakan berdasarkan kuesioner. Struktur hierarki dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Data primer (2018), diolah

Gambar 2. Struktur hierarki strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan masyarakat dengan bobot sebesar 0.559. Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Pada Level stakeholders untuk Faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada Swasta dengan bobot sebesar 0.715 dibandingkan dengan NGO sebesar 0.285. Peran pemerintah dalam pembangunan Nasional terbagi menjadi lima, yaitu : Peran

selaku stabilisator, Peran selaku inovator, Peran selaku modernisator, Peran selaku pelopor, Peran selaku pelaksana sendiri. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak diandalkan. Model-model kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta telah dikembangkan untuk membangun fasilitas pertanian dari hulu hingga hilir, selain skema saling menguntungkan berupa inti plasma, swasta dapat juga menggulirkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pada Level kendala memiliki prioritas yaitu Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 0.347. pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi dengan bobot sebesar 0.215. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bahwa Pemerintah Daerah bersama para akademisi mencanangkan program berkelanjutan dengan tujuan penetapan tim pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sementara itu, untuk hasil analisis horizontal untuk bobot setiap kendala terhadap *stakeholder* diperoleh *Consistency Ratio* (CR) < 0.10 artinya jawaban pakar telah konsisten. *Stakeholders* Pemerintah Kab. Bogor, NGO dan Swasta lebih memprioritaskan kendala Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 0.367, 0.308 dan 0.362, sedangkan stakeholders akademisi lebih memprioritaskan kendala pada kajian akademik dengan bobot sebesar 0.323 (Tabel 4).

Tabel 4. Bobot horizontal setiap kendala terhadap *stakeholder*

| Kendala | Stakeholders | | | |
|--|----------------------------|-------|--------|-----------|
| | Pemerintah Kabupaten Bogor | NGO | Swasta | Akademisi |
| Belum terbitnya Perda LP2B | 0.135 | 0.144 | 0.194 | 0.380 |
| Kurang kolaborasi dengan Pemerintah Daerah | 0.367 | 0.308 | 0.362 | 0.180 |
| Pola pemberdayaan inti plasma/syariah | 0.286 | 0.282 | 0.273 | 0.118 |
| Kajian akademik | 0.211 | 0.266 | 0.172 | 0.323 |
| <i>Consistency ratio</i> | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |

Sumber: Data primer (2018), diolah



Kendala terbitnya Peraturan Daerah LP2B memilih prioritas strategi pada Mengefektifkan dan Kolaborasi Dengan Peran Swasta dan NGO dengan bobot sebesar 0.204. kendala Kurang Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah memilih prioritas strategi pada Penetapan Tim Pengendali Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pendamping akademisi dengan bobot sebesar 0.352 (Tabel

5). kendala Pola Pemberdayaan Inti Plasma/syariah memilih prioritas strategi pada Skema Pembiayaan Lunak yang mudah diakomodir Petani dengan bobot sebesar 0.204. kendala Kajian Akademik memilih prioritas strategi pada Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas peraturan zonasi lahan sawah dengan bobot sebesar 0.273.

| Alternatif Strategi | Kendala | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| | Belum terbitnya Perda LP2B | Kurang kolaborasi dengan Pemerintah Daerah | Pola pemberdayaan inti plasma/syariah | Kajian akademik |
| Penetapan peraturan yang terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan | 0.137 | 0.061 | 0.147 | 0.099 |
| Mengefektifkan dan kolaborasi dengan peran swasta dan NGO | 0.204 | 0.137 | 0.136 | 0.054 |
| Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas peraturan zonasi lahan sawah | 0.077 | 0.057 | 0.073 | 0.273 |
| Skema pembiayaan lunak yang mudah diakomodir petani | 0.185 | 0.139 | 0.204 | 0.084 |
| Penguatan kelembagaan ekonomi petani | 0.156 | 0.147 | 0.172 | 0.145 |
| Pengendalian pemanfaatan ruang dengan pendamping dari akademisi | 0.056 | 0.105 | 0.151 | 0.095 |
| Penetapan tim pengendali lahan pertanian pangan berkelanjutan pendamping akademisi | 0.186 | 0.352 | 0.116 | 0.249 |
| <i>Consistency ratio</i> | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |

Iktisar dari pembahasan strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor melalui Analisis AHP adalah Pemberdayaan usahatani meliputi kegiatan: (1) Fasilitasi kelompok usaha tani yang tidak feasible dan tidak *bankable* melalui bantuan langsung masyarakat untuk mengembangkan usaha agribisnis; (2) Mendorong kelompok usaha tani yang tidak feasible dan tidak *bankable* menjadi usaha yang feasible tetapi belum *bankable*; (3) Fasilitasi kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum *bankable* dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat untuk mengembangkan usaha agribisnis; (4) Mendorong kelompok usaha tani yang feasible tetapi belum *bankable* menjadi usaha yang feasible dan *bankable*; (5) Untuk mendukung kelompok usaha tani yang feasible dan *bankable*, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui instansi yang membidangi bidang pertanian beserta turunannya perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar

investasi domestik dan investasi asing masuk ke sektor agribisnis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis vertikal, pada level faktor yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan masyarakat. Pada level *stakeholders* untuk faktor pemberdayaan masyarakat lebih prioritas pada swasta. pada level kendala memiliki prioritas yaitu kurang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pada level alternatif strategi memiliki prioritas pada penetapan tim pengendali lahan pertanian pangan berkelanjutan pendamping akademisi. *Stakeholders* pemerintah Kabupaten Bogor, LSM/Yayasan dan swasta lebih memprioritaskan kendala Kurang Kolaborasi dengan pemerintah daerah, oleh karenanya dibutuhkan komitmen bersama dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan.

Saran

Titik tumpu (entry point) strategi pengendalian adalah komitmen bersama terutama pimpinan daerah dalam menyikapi alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjalankan konsekuensi setelah terbitnya peraturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. fokus strategi pengendalian adalah melakukan alternatif perlindungan lahan pertanian dengan model wakaf lahan. Esensinya, sikap pandang pemangku kepentingan berlandaskan inisiatif masyarakat dalam bentuk partisipasi aksi kolektif yang sinergis dengan peraturan kebijakan. Sasaran (goal) strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan baik dari peraturan maupun kebijakan yang menguntungkan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor & [PSP3] Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-IPB. 2010. *Kaji Tindak Pengembangan Kelembagaan Sistem Pendanaan Dan Pemasaran Dalam Revitalisasi Pertanian Di Kabupaten Bogor*. Bogor (ID): PSP3-IPB.
- [Distanhut] Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bogor. 2012. *Pendataan Dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Beserta Cadangannya*. Bogor (ID) : Distanhut.
- Falatehan, A. Faroby. 2016. *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Indomedia Pustaka.
- Rahmawan Y. 2013. *Strategi Pengelolaan Kepentingan Para Pihak Terhadap Upaya Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor*. Sekolah Pasca Sarjana, Thesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saaty TL. 1991. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks*. Jakarta (ID): Pustaka Binaman Pressindo.
- Swastika DKS, WargionoJ, Soejitno dan Hasanuddin A. 2007. Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Melalui Efisiensi Pemanfaatan lahan Sawah Di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.5(1): 36-52.



PEDOMAN PENULISAN
JURNAL MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

1. **SIFAT NASKAH.** Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Naskah tersebut harus sesuai dengan tema Manajemen Pembangunan Daerah.
2. **BANTUK NASKAH.** Naskah diketik dengan Ms. Word (min versi 2013), font Time News Roman (10), 1.5 (satu setengah) spasi dan abstrak 1 (satu) spasi. Panjang naskah maksimum 20 halaman termasuk tabel, gambar, perhitungan dan literatur. Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut : Judul Naskah, Nama Penulis, Nama dan Alamat Instansi (Pos maupun E-mail), abstrak dan kata kunci dalam 2 (dua) bahasa (Indonesia dan Inggris), pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, daftar pustaka dan lampiran (jika ada).
3. **BAHASA.** Naskah harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku. Untuk naskah bahasa Indonesia pemakaian istilah – istilah asing sebaiknya dikurangi/disesuaikan dengan pedoman bahasa Indonesia.
4. **JUDUL NASKAH.** Judul harus mencerminkan isi naskah.
5. **ABSTRAK.** Abstrak harus mencakup tujuan, metode, lokasi, hasil utama dan implikasi kebijakan dengan maksimum 200 kata dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris).
6. **TABEL.** Tabel diberi judul singkat, jelas dan diikuti keterangan tempat dan waktu cakupan data. Jumlah digit yang dipergunakan untuk parameter estimasi dapat mencapai 4 (empat) digit di belakang koma, sedangkan untuk parameter lain 2 (dua) digit di belakang koma. Penggunaan titik (.) pada bilangan ribuan dan koma (,) pada decimal.
7. **GAMBAR DAN GRAFIK.** Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan direduksi antara 50-60 persen dari gambar dan grafik asli. Judul gambar dan grafik diletakkan di bawahnya tanpa mempengaruhi bagian gambar atau grafik.
8. **SATUAN PENGUKURAN.** Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik misalnya cm, kg, l, ha dan lain sebagainya.
9. **DAFTAR PUSTAKA.** Kutipan pustaka dalam teks harus ada di dalam daftar pustaka dan disusun sesuai dengan abjad dengan urutan nama pengarang, tahun, judul karangan, nama majalah/buku/jurnal publikasi, penerbit dan halaman.
10. **PENYERAHAN NASKAH.** Diserahkan ke alamat redaksi 4 (empat) bersama cd/dvd yang berisikan naskah tulisan atau berupa attachment file melalui email tertera.
11. **WAKTU PENERBITAN.** Jurnal MPD akan diterbitkan dua nomor dalam satu volume, satu volume merupakan satu tahun penerbitan.

Program Studi
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
Fakultas Ekonomi dan Manajemen - Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Wing 5 Level 4, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
Telp/Fax: 0251-8629342. Mobile: 085218426205
Website: <http://mpd.ipb.ac.id/>, email: mpdipb@hotmail.com

